Topik *blue economy* semakin menjadi diskursus oleh para sarjana manajemen dan kebijakan publik, terutama dalam satu dekade terakhir. Secara empirik *blue economy* terbukti dapat menjadi salah satu determinan pembangunan nasional, terutama di negara-negara dengan tipologi khas kelautan/kemaritiman (termasuk Indonesia). Negara (maupun entitas lain yang lebih spesifik) yang mampu mengoptimalkan potensi *blue economy* secara koheren akan dapat mendorong pula kemajuan/pertumbuhan ekonomi. Hasil kajian *International Monetary Fund* (IMF) bahkan menyimpulkan bahwa idealnya kontribusi ekonomi kelautan pada entitas dengan tipologi khas kelautan/kemaritiman dapat berkontribusi sebanyak 68% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemilihan Aceh sebagai lokus studi dalam penulisan buku ini didasarkan pada tesis bahwa Aceh merupakan salah satu entitas dengan tipologi khas kelautan/kemaritiman yang memiliki pelbagai potensi sangat besar untuk mengembangkan/mengoptimalkan *blue economy*. Potensi-potensi dimaksud antara lain: melimpahnya sumber daya perikanan, kekayaan ekosistem karang dan keanekaragaman hayati, luasnya hutan mangrove dan ekosistem pesisir yang diversifikatif, serta kearifan budaya lokal yang bisa menarik wisatawan.Buku dengan judul "Strategi Optimalisasi Potensi *Blue Economy*: Kajian Empirik dari Perspektif Manajemen dan Kebijakan Publik di Bumi Serambi Mekkah" ini berisi tulisan tentang 4 bagian utama yang meliputi: konsep ekonomi kelautan, potensi ekonomi kelautan Kota Banda Aceh, strategi optimalisasi potensi ekonomi kelautan Kota Banda Aceh dari perspektif manajemen, dan strategi optimalisasi potensi *blue economy* Kota Banda Aceh dari perspektif kebijakan publik.

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
Email : penerbitmafy@gmail.com
Website : penerbitmafy.com
FB : Penerbit Mafy

PENDIDIKAN
ISBN 978-623-8659-48-7
9 786238 659487

STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI BLUE ECONOMY

STRATEGI
OPTIMALISASI POTENSI *BLUE ECONOMY*

KAJIAN EMPIRIK DARI PERSPEKTIF MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI BUMI SERAMBI MEKKAH

Abdul Rahman, Desy Puspita, Zahriatul Aini

STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI

BLUE ECONOMY

Kajian Empirik dari Perspektif Manajemen Dan Kebijakan Publik di Bumi Serambi Mekkah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113 KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI
BLUE ECONOMY
Kajian Empirik dari Perspektif Manajemen Dan Kebijakan Publik di Bumi Serambi Mekkah

Abdul Rahman, S.AP., M.A.

Desy Puspita, S.P., M.M.

Zahriatul Aini, S.E., M.M.

STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI *BLUE ECONOMY*
Kajian Empirik dari Perspektif Manajemen Dan Kebijakan Publik di Bumi Serambi Mekkah

Penulis:
Abdul Rahman, S.AP., M.A.
Desy Puspita, S.P., M.M.
Zahriatul Aini, S.E., M.M.

Editor:
Mawar, S.IP., M.AP
Agustina, S.E, M.Si

Desain Cover:
Hekkar, S.T.

Ukuran:
iv, 109 hlm, 15,5 cm x 23 cm

ISBN:
978-623-8659-48-7

Cetakan Pertama:
Juni 2024

PENERBIT PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312
Kontak: 081374311814
Website: www.penerbitmafy.com
E-mail: penerbitmafy@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah… Puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Secara umum, buku ini dibuat dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Secara khusus, buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan manajemen dan kebijakan publik, spesifiknya pada topik *blue economy*. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat menjadi rekomendasi informasi strategis bagi pengampu kebijakan *blue economy*, baik di tingkat nasional maupun tingkat regional.

Topik *blue economy* semakin menjadi diskursus oleh para sarjana manajemen dan kebijakan publik, terutama dalam satu dekade terakhir. Secara empirik *blue economy* terbukti dapat menjadi salah satu determinan pembangunan nasional, terutama di negara-negara dengan tipologi khas kelautan/kemaritiman (termasuk Indonesia). Negara (maupun entitas lain yang lebih spesifik) yang mampu mengoptimalkan potensi *blue economy* secara koheren akan dapat mendorong pula kemajuan/ pertumbuhan ekonomi. Hasil kajian *International Monetary Fund* (IMF) bahkan menyimpulkan bahwa idealnya kontribusi ekonomi kelautan pada entitas dengan tipologi khas kelautan/kemaritiman dapat berkontribusi sebanyak 68% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemilihan Aceh sebagai lokus studi dalam penulisan buku ini didasarkan pada tesis bahwa Aceh merupakan salah satu entitas dengan tipologi khas kelautan/kemaritiman yang memiliki pelbagai potensi sangat besar untuk mengembangkan/ meng-optimalkan *blue economy*. Potensi-potensi dimaksud antara lain: melimpahnya sumber daya perikanan, kekayaan ekosistem karang dan keanekaragaman hayati, luasnya hutan mangrove dan

ekosistem pesisir yang diversifikatif, serta kearifan budaya lokal yang bisa menarik wisatawan.

Buku dengan judul "**Strategi Optimalisasi Potensi *Blue Economy*: Kajian Empirik dari Perspektif Manajemen Dan Kebijakan Publik di Bumi Serambi Mekkah**" ini berisi tulisan tentang 4 bagian utama yang meliputi: konsep ekonomi kelautan, potensi ekonomi kelautan Kota Banda Aceh, strategi optimalisasi potensi ekonomi kelautan Kota Banda Aceh dari perspektif manajemen, dan strategi optimalisasi potensi *blue economy* Kota Banda Aceh dari perspektif kebijakan publik.

Kedepan, buku ini dapat berpotensi dikembangkan lebih lanjut dengan proyeksi topik studi: Rancang Bangun Manajemen dan Kebijakan Strategis pada *Blue Economy* pada Tataran Pemerintah Daerah. Demikian, sekali lagi semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pembacanya. Akhir kata, wassalamu'alaykum warohmatullohi wabarokatuh.

Banda Aceh, 1 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I.

KONSEP EKONOMI KELAUTAN

1. Definisi Ekonomi Kelautan

Ekonomi kelautan, atau yang kerap disebut juga dengan *blue economy* merupakan konsep yang tengah menjadi diskursus baik dalam tataran teoretis maupun tataran praksis, terutama dalam 1 (satu) dekade terakhir. Ekonomi kelautan menjadi bidang kajian yang relatif kontemporer yang mencakup kegiatan ekonomi yang bergantung pada laut, dan sering dikaitkan dengan sektor ekonomi lainnya, termasuk pariwisata, transportasi laut, energi, dan perikanan [1]. *World Bank* mendeskripsikan ekonomi kelautan (*blue economy*) sebagai pembangunan ekonomi berbasis kelautan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan [2].

Adapun OECD mendefinisikan ekonomi kelautan sebagai serangkaian sektor yang secara langsung atau tidak langsung bergantung pada sumber daya laut. Hal ini mencakup sumber daya laut yang dieksploitasi secara tradisional, baik sumber daya hayati (perikanan tangkap) maupun sumber daya non hayati (minyak, gas, manufaktur dan konstruksi kelautan), serta pemanfaatan lautan untuk pariwisata, edukasi, pelabuhan laut, dan pelayaran. Sektor-sektor tersebut juga mencakup sektor-sektor berbasis kelautan yang baru-baru ini muncul karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti: energi angin lepas pantai, energi pasang surut dan gelombang, budidaya laut, penambangan logam dan mineral dasar laut, bioteknologi kelautan, dan bioprospeksi. Jasa lingkungan seperti perlindungan pantai juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan aktivitas manusia lainnya [3].

Sementara itu, Kathijotes menyatakan ekonomi kelautan merupakan arus utama pembangunan nasional, dan dapat mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan sosio-ekonomi berbasis darat dan laut [4]. Di sisi lain, Phelan, dkk menyatakan bahwa ekonomi kelautan identik dengan menghasilkan kekayaan dari aktivitas yang berkaitan dengan lautan, sekaligus melindungi dan mendukung ekosistem laut [5]. Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa secara esensial ekonomi kelautan bertujuan untuk mengoptimalisasi laut sebagai determinan pembangunan ekonomi pada suatu entitas daerah/wilayah, namun dengan tetap mengekang hilangnya keanekaragaman hayati dan menjaga harmoni sosial, sehingga mengintegrasikan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

2. Dampak Dimensi Ekonomi pada Pembangunan Ekonomi Kelautan: Lanskap Praksis

Ekonomi kelautan lebih menitikberatkan pada hubungan keberlanjutan, ketahanan pangan, serta pembangunan ekonomi pada aspek-aspek seperti: budidaya dan pengolahan perikanan dan produk-produknya, pengolahan garam dan rumput laut, transportasi, energi, dan pariwisata bahari di entitas daerah/ wilayah yang secara natural berkarakteristik kelautan (kepulauan, pesisir, dan lain-lain). Aspek-aspek tersebut diharapkan men-

dorong signifikansi ekonomi yang progresif terhadap suatu entitas daerah/wilayah. Hasil kajian *International Monetary Fund* (IMF) menemukan bahwa idealnya kontribusi ekonomi kelautan (terutama dari aspek-aspek tersebut) dapat berkontribusi sebanyak 68% dari Produk Domestik Bruto (PDB) suatu entitas daerah/wilayah [6].

Standar besar tersebut tidak mengherankan mengingat industri ekonomi kelautan (*blue economy*) menyediakan mata pencaharian bagi lebih dari 820 juta orang di seluruh dunia dalam berbagai bidang seperti: pelayaran dan transportasi terkait, pembangkit energi, pertambangan, konstruksi, perdagangan, pariwisata, dan penelitian (tanpa mengabaikan layanan penting lainnya). Mengingat luasnya distribusi peluang dan manfaat yang dihasilkannya di seluruh dunia tersebut (terutama di negara-negara berkembang), sektor ekonomi kelautan dapat dianggap sebagai salah satu sektor yang paling penting, misalnya dari aspek perikanan.

Produksi ikan dunia meningkat hingga hampir 171 juta ton, sekitar setengahnya berasal dari budidaya perikanan, dan nilainya diperkirakan mencapai USD 362 miliar [7]. Ikan mewakili hampir 20% dari asupan protein hewani individu sebanyak 3,2 miliar orang, dan 17% dari seluruh pasokan makanan protein hewani global [8, 9]. Selain itu, sektor akuakultur juga terus tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor produksi pangan inti lainnya, dengan tingkat pertumbuhan tahunan hampir 6%. Hampir 60 juta orang mempunyai mata pencaharian utama melalui perikanan atau budi daya perairan, lebih dari 96% diantaranya tinggal di negara-negara berkembang di Asia dan Afrika [7].

Pada negara-negara Asia Selatan, faktor ekonomi kelautan memainkan peran yang signifikan secara statistik dalam berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan ke-14 dari *Sustainable Development Goals*/SDG's (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang diinisiasi *United Nations*/Persatuan Bangsa-Bangsa, yaitu: Untuk melestarikan dan memanfaatkan lautan dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan, dan dalam pertumbuhan ekonomi (khususnya peningkatan *Gross Domestic Product*/Produk Domestik Bruto). Bangladesh misalnya,

yang mampu mengoptimalkan ekonomi kelautan sehingga mening katkan PDB sebesar 7,3%, juga India 7,2%, dan Nepal 6,5% [10].

Sementara itu, riset yang dilakukan Karani dan Failler [11] menemukan bahwa pengembangan ekonomi kelautan yang meliputi pariwisata pesisir dan maritim, ketahanan iklim, lingkungan hidup, karbon biru dan jasa serta infrastruktur ekosistem di 13 negara di Afrika mendukung gagasan Penciptaan Kekayaan dan Keberlanjutan Ekosistem Laut Besar dengan aspirasi Afrika yang sejahtera, mendorong pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan *World Bank*, dampak dari pembangunan ekonomi kelautan juga sangat dirasakan oleh negara-negara Asia Pasifik seperti: Vanuatu, Marshall Island, Brunei Darussalam, dan Indonesia karena mampu mengerek kenaikan PDB sebanyak 33% [12].

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan Muhaimid, dkk yang didasarkan pada data panel periode 2010-2019 untuk 11 negara di Eropa yaitu: Belgia, Belanda, Bulgaria, Jerman, Estonia, Slovenia, Spanyol, Prancis, Kroasia, Italia, Inggris, yang menyediakan data yang diperlukan untuk penelitian ekonomi kelautan pada jasa transportasi dan perdagangan menemukan bahwa total produksi modal (ton) dan total barang yang diangkut melalui pelabuhan (ton) berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut [7]. Berdasarkan pengalaman-pengalaman di berbagai negara dan belahan dunia tersebut, secara empiris terbukti bahwa negara-negara yang memiliki atensi tinggi terhadap pembangunan ekonomi kelautan tersebut dan mengoptimalisasinya, mampu secara signifikan mendorong peningkatan aspek-aspek perekonomian.

3. Urgensitas Dimensi Sosial dan Lingkungan pada Pembangunan Ekonomi Kelautan

Meskipun ekonomi kelautan menitikberatkan dimensi ekonomi, namun dimensi sosial tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Dimensi sosial tersebut terutama mengacu pada: pengakuan dan perlakuan adil terhadap semua kelompok yang akan mendapat manfaat atau terkena dampak dari industri kelautan eksisting maupun yang baru, dimasukkannya mereka ke dalam rencana

pembangunan dan kebijakan ekonomi kelautan yang akan berdampak pada mereka, dan tercapainya distribusi manfaat dan beban yang lebih adil dari industri-industri ekonomi kelautan. Hal tersebut sangat krusial mengingat masyarakat/publik juga merupakan salah satu *stakeholder* inti dalam tata kelola negara, dan merupakan pihak yang akan sangat terdampak dari dibuatnya kebijakan-kebijakan oleh pejabat-pejabat negara berwenang.

Dalam praktiknya, kemungkinan besar fokus utama perencanaan pengampu kebijakan ekonomi kelautan adalah pada keadilan prosedural (proses pembangunan yang adil bagi semua pihak yang terlibat atau terkena dampak industri kelautan), dibandingkan keadilan distribusi (distribusi biaya dan manfaat yang adil). Adapun hal terakhir tersebut mungkin diharapkan dapat dipenuhi dalam desain dan implementasi kebijakan pembangunan yang benar-benar inklusif, dimana kelompok-kelompok yang termarjinalkan (baik secara historis maupun saat ini), mempunyai hak untuk turut menentukan definisi “keadilan”. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa mengukur distribusi manfaat atau biaya antar pemangku kepentingan relatif mudah, namun lebih sulit untuk mengevaluasi keadilan prosedural dan hasil sosial [13].

Hal ini terutama berlaku ketika terjadi kesenjangan kepentingan diantara para *stakeholders* sumber daya laut. Misalnya seperti disinklusi yang terjadi di *Pacific Small Island Developing States*/SIDS [14] (Negara-negara Berkembang Pulau-Pulau Kecil di Pasifik) seperti: Dominica, Mauritius, dan Barbados akibat pembangunan ekonomi kelautan yang cenderung eksploitatif tanpa memperhatikan aspek sosial seperti pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan pekerjaan. Permasalahan sosial sebagai dampak dari pembangunan ekonomi kelautan juga terjadi di *European Atlantic Arc* [15]. Permasalahan antar sektor tersebut muncul karena sifat sumber daya itu sendiri (karena sumber daya bersifat terbatas), penggunaannya dan komitmen untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya laut yang efisien, misalnya pariwisata tradisional versus ekstraksi hidrokarbon lepas pantai, dan perikanan rakyat skala kecil versus industri perikanan korporasi berskala besar.

Selain itu, problematika sosial dalam pembangunan ekonomi kelautan dapat terjadi karena peran pemangku kepentingan utama seperti masyarakat dan industri kurang jelas, kerangka kebijakan yang kurang komprehensif, dan lebih kompleks dibandingkan dominasi kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi kelautan seharusnya dapat lebih membuka dialog dan diskursus yang lebih deliberatif, terutama bagi masyarakat dan industri. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak penelitian dan penyelidikan (terutama oleh pengampu kebijakan ekonomi kelautan) untuk mengidentifikasi harapan para pemangku kepentingan dan pelaku utama dalam setiap aktivitas/ proses pembangunan ekonomi kelautan, agar dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan, dan dampak manfaatnya bukan hanya dirasakan secara ekonomi namun juga secara sosial.

Pembangunan ekonomi kelautan hendaknya mampu mendorong keseimbangan antara dimensi pertumbuhan ekonomi, dimensi peningkatan kehidupan dan inklusi sosial, serta dimensi terjaganya kelestarian lingkungan. Ketiganya sangat penting, dan para pengampu kebijakan pembangunan ekonomi kelautan pada tataran internasional sudah mencapai konsensus terkait urgensitas keseimbangan ketiga dimensi tersebut pada 3 (tiga) event internasional [16], yakni: Dimensi lingkungan/sumber daya didefinisikan di Stockholm pada tahun 1972 pada konferensi PBB pertama tentang Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*/SD); dimensi ekonomi, di Rio 1992 pada konferensi PBB kedua tentang SD; dan dimensi sosial di Johannesburg 2002 pada konferensi PBB ketiga tentang SD.

Aspek lingkungan menjadi sangat relevan untuk diperhatikan mengingat kehidupan berasal dari lautan yang mencakup lebih dari 95% biosfer. Lautan, tanpa mempedulikan apa yang kita lakukan terhadap kesejahteraannya, terus mendukung semua kehidupan dengan menghasilkan oksigen, menyerap karbondioksida, mendaur ulang nutrisi, dan mengatur iklim dan suhu global [17]. Secara lebih spesifik, berikut beberapa alasan menyoroti pentingnya pertimbangan lingkungan dalam pembangunan ekonomi kelautan:

a. Kesehatan Ekosistem: Ekosistem laut yang sehat sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi kelautan. Keanekara-

gaman hayati, kualitas air, dan kesehatan ekosistem secara keseluruhan berkontribusi terhadap produktivitas sumber daya kelautan, termasuk perikanan dan budidaya perairan.

b. Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan: Eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan, seperti penangkapan ikan yang berlebihan, dapat menyebabkan menipisnya stok ikan dan spesies laut lainnya. Dengan mempertimbangkan lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi kelautan, praktik pengelolaan sumber daya berkelanjutan dapat diterapkan untuk menjamin kelangsungan sumber daya tersebut dalam jangka panjang.

c. Ketahanan Perubahan Iklim: Lautan memainkan peran penting dalam mengatur iklim bumi. Dampak perubahan iklim, seperti naiknya permukaan air laut, pengasaman laut, dan perubahan suhu, dapat mempengaruhi keberhasilan inisiatif ekonomi kelautan. Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim sangat penting bagi ketahanan kegiatan ekonomi berbasis kelautan.

d. Nilai Budaya dan Sosial: Banyak entitas di seluruh dunia bergantung pada lautan untuk identitas budaya dan mata pencaharian mereka. Melindungi lingkungan laut memastikan bahwa entitas-entitas ini dapat terus memperoleh manfaat dari sumber daya laut dan mempertahankan keberlanjutan kehidupan mereka.

e. Pariwisata dan Rekreasi: Ekosistem laut sering kali menarik wisatawan dan kegiatan rekreasi. Lingkungan yang asri meningkatkan daya tarik kawasan pesisir, mendukung sektor pariwisata, yang merupakan komponen penting dari banyak perekonomian biru.

f. Inovasi dan Penelitian: Lingkungan laut yang sehat mendorong inovasi di sektor-sektor seperti bioteknologi kelautan dan farmasi. Penelitian terhadap ekosistem laut dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat, baik bagi perekonomian, sosial maupun pelestarian lingkungan.

g. Integrasi Internasional: Lautan saling berhubungan dan kesehatannya menjadi perhatian global. Upaya kolaboratif diperlukan untuk mengatasi masalah lintas batas internasional (seperti polusi, pencemaran limbah air laut, dan penangkapan ikan berlebihan). Kerja sama internasional

sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan ekonomi kelautan.

Singkatnya, mempertimbangkan lingkungan dalam pengembangan ekonomi biru bukan hanya sebuah pilihan etis namun juga sebuah pilihan strategis. Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan sangat penting bagi keberhasilan dan ketahanan ekonomi biru dalam jangka panjang. Praktik dan kebijakan berkelanjutan memastikan bahwa generasi sekarang dan masa depan dapat terus memperoleh manfaat dari kekayaan sumber daya yang disediakan oleh lautan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan (sekaligus dikembangkan), terutama oleh pengampu kebijakan pembangunan ekonomi kelautan untuk menjaga lingkungan hidup antara lain:

a. Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan: a) Menerapkan praktik pengelolaan berbasis ekosistem untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan; b) Mengadopsi teknik pengelolaan perikanan berkelanjutan, termasuk menetapkan batas tangkapan, mengatur peralatan, dan membangun cagar alam laut untuk melindungi habitat kritis; dan c) Mempromosikan praktik akuakultur yang bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak lingkungan.
b. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Upaya yang dapat dilakukan meliputi: a) Mengembangkan dan menerapkan rencana *Integrated Coastal Zone Management*/ICZM yang mempertimbangkan seluruh zona pesisir, mengatasi interaksi antara daratan dan lautan; dan b) Menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan upaya konservasi untuk menjaga kesehatan ekosistem pesisir.
c. Perencanaan Tata Ruang Laut (*Marine Spatial Planning*/MSP) yang Komprehensif. MSP yang komprehensif dapat dimanfaatkan untuk mengalokasikan ruang untuk berbagai kegiatan, dengan mempertimbangkan faktor ekologi, ekonomi, dan sosial untuk meminimalkan konflik dan memastikan pemanfaatan wilayah laut secara berkelanjutan.
d. Tata Kelola yang Inklusif dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan. Hal tersebut dilakukan dengan a) Melibatkan masyarakat lokal, kelompok adat, dan pemangku

kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan didistribusikan secara adil; dan b) Merekognisi dan mengkolaborasikan pengetahuan tradisional masyarakat lokal/adat ke dalam strategi pengelolaan dan konservasi laut.

e. Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Ekonomi Kelautan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: a) Berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan untuk membangun kapasitas masyarakat lokal, pejabat pemerintah, dan dunia usaha untuk terlibat dalam praktik berkelanjutan; dan b) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan penggunaan sumber daya berkelanjutan bagi semua stakeholders maupun shareholders ekonomi kelautan.

f. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Hal tersebut dilakukan dengan: a) Mengembangkan strategi untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem; dan b) Menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari aktivitas kelautan, serta turut berkontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim global.

g. Tanggung Jawab Sosial dan Praktik Bisnis Inklusif. Upaya ini dapat dilakukan dengan: a) Mendorong dunia usaha yang beroperasi dalam ekonomi kelautan untuk mengadopsi praktik-praktik yang bertanggung jawab secara sosial, termasuk praktik ketenagakerjaan yang adil, inisiatif pengembangan masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan; dan b) Mempromosikan model bisnis inklusif yang bermanfaat bagi masyarakat lokal dan mendorong stabilitas sosial.

h. Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah. Hal ini dapat dilakukan dengan: a) Menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan polusi dari sumber-sumber darat dan laut; b) Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang efektif untuk meminimalkan polusi plastik dan bentuk sampah laut lainnya.

i. Kolaborasi internasional. Langkah yang dapat dilakukan antara lain: a) Berkolaborasi dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional untuk mengatasi masalah lintas

batas, seperti penangkapan ikan ilegal dan polusi; b) Berpartisipasi dalam inisiatif regional dan global yang mempromosikan praktik ekonomi biru berkelanjutan.

Strategi-strategi tersebut di atas dapat dielaborasikan dengan dorongan inovasi sosial. Inovasi sosial adalah proses pengembangan konsep, strategi, solusi, atau ide lain yang efektif yang dapat membantu memecahkan permasalahan sosial dan/atau lingkungan yang menantang melalui tindakan kolaboratif oleh sekelompok aktor. Inovasi sosial dapat menghasilkan perubahan perilaku di seluruh institusi, pasar atau sektor publik, dan dapat meningkatkan kreativitas dan tindakan yang bertanggung jawab menuju sintesis tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan. Mungkinkah pertumbuhan ekonomi kelautan memungkinkan inovasi sosial sebagai strategi penggunaan dan pengelolaan sumber daya kelautan?

Soma dkk [18] mengkaji permasalahan ini dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dan menyimpulkan bahwa hal ini mungkin saja terjadi, namun keberhasilannya akan bergantung pada terciptanya kerja sama, inklusivitas, dan kepercayaan diantara berbagai aktor. Dengan mengintegrasikan strategi-strategi tersebut, dan dorongan inovasi sosial, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat berupaya menuju ekonomi kelautan yang lebih seimbang dan berkelanjutan yang mencapai pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan holistik ini mengakui keterkaitan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat diwujudkan tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat.

4. Kerangka Kerja Pembangunan Ekonomi Kelautan

Keseimbangan antara 3 (tiga) dimensi inti ekonomi kelautan (dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan) tersebut di atas perlu dirumuskan dengan kerangka kerja yang efektif, agar dalam implementasi terdapat acuan yang konkret sebagai pedoman, dan agar dalam proses evaluasi dapat dinilai secara obyektif tingkat keberhasilan kebijakan maupun program-program ekonomi kelautan. Cisneros, dkk mengusulkan kerangka kerja ekonomi kelautan dengan mengintegrasikan kapasitas ekonomi kelautan

(*blue economy capacity*) dan ketersediaan sumber daya (*resource availability*) sebagaimana ditunjukkan pada kerangka kerja di bawah ini [19]:

Gambar 1.1. Kerangka Kerja Ekonomi Kelautan Model Cisneros, dkk
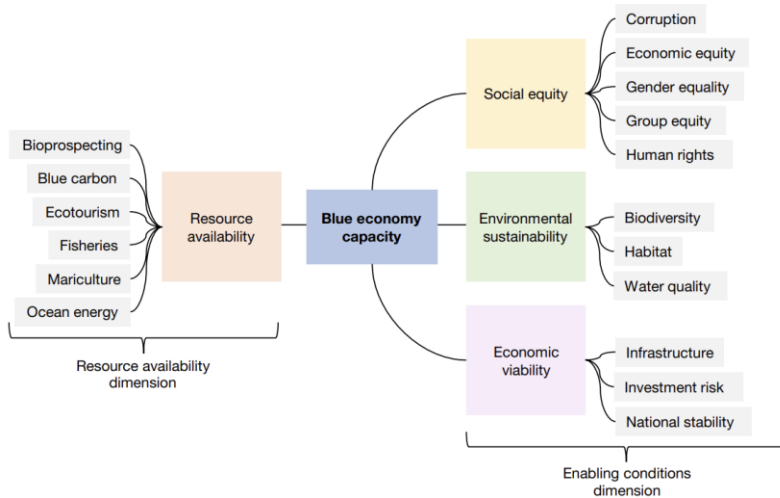
Sumber: Cisneros, dkk (2021)

Berdasarkan kerangka kerja (*framework*) tersebut, membangun ekonomi kelautan yang adil dan berkelanjutan perlu mempertimbangkan sumber daya biofisik untuk pengembangan sektor (*resource availability*), dan kondisi yang memungkinkan kemajuan kesejahteraan selanjutnya (*enabling conditions*). Kondisi yang memungkinkan terdiri dari kriteria yang berkaitan dengan *social equity*/keadilan sosial (hak asasi manusia, kesetaraan gender, keadilan kelompok dan ekonomi, serta korupsi), keberlanjutan kelestarian lingkungan/*environmental sustainability* (termasuk habitat, kualitas air dan keanekaragaman hayati), dan *economic viability*/kelayakan ekonomi (infrastruktur, risiko investasi, dan stabilitas nasional).

Sejalan dengan visi transformatif ekonomi kelautan, maka *resource availability*/ketersediaan sumber daya difokuskan pada 6 (enam) sektor yang bergantung pada sumber daya hayati dan/atau kelautan terbarukan. Bidang-bidang tersebut adalah: bioprospeksi (untuk sumber daya genetik kelautan dan senyawa bioaktif), karbon biru (melibatkan restorasi dan konservasi sistem vegetasi

pesisir yang bernilai dalam pasar karbon), ekowisata (menekankan pendidikan, konservasi dan manfaat lokal), perikanan, budidaya laut dan energi laut (lepas pantai angin dan pasang surut).

Selain kerangka kerja tersebut, terdapat juga kerangka kerja lain pembangunan ekonomi kelautan dimana terdapat 5 (lima) determinan ekonomi kelautan yang meliputi: ketahanan ekosistem, keberlanjutan ekonomi, keterlibatan masyarakat, integrasi kelembagaan, dan kapasitas teknis [20], sebagaimana ditunjukkan pada kerangka kerja berikut ini:

Gambar 1.2. Kerangka Kerja Ekonomi Kelautan Model Keen, dkk
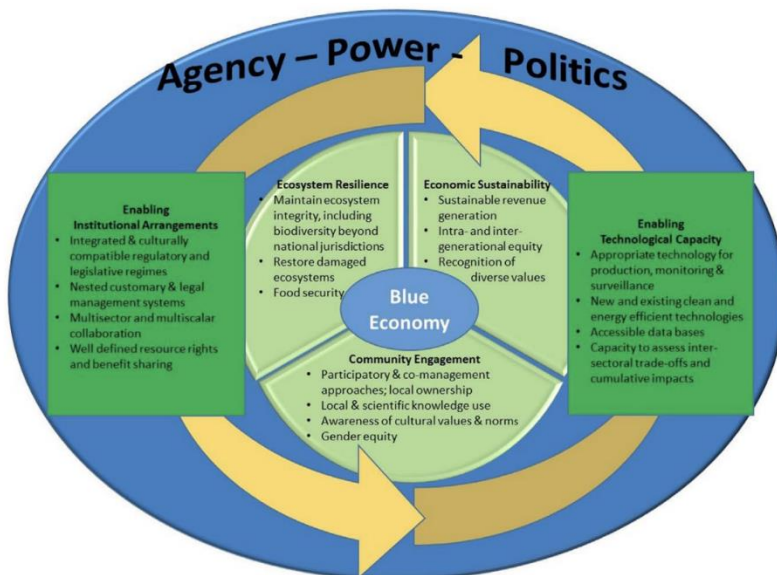
Sumber: Keen, dkk (2018)

Ketahanan ekosistem, keberlanjutan ekonomi, dan keterlibatan masyarakat secara langsung berasal dari akar ekonomi kelautan dalam literatur pembangunan berkelanjutan, yang dalam kerangka kerja disebut sebagai komponen inti. Mempertahankan ketahanan ekosistem merupakan hal yang penting, mengingat daya dukung ekosistem laut sangat mungkin berada di bawah tekanan/ancaman (bencana alam, invasi negara asing, dan lain-lain) yang mencakup skala lokal hingga global, dan dapat menimbulkan dampak kumulatif dan lintas yurisdiksi. Keberlanjutan ekonomi mencakup mata pencaharian entitas

daerah/wilayah ekonomi kelautan, serta kegiatan komersial yang menghasilkan lapangan kerja dan pendapatan pemerintah.

Melengkapi ketiga hal tersebut adalah keterlibatan masyarakat, yang sangat penting mengingat potensi kurangnya jangkauan sistem pemerintahan pusat, tingginya proporsi penduduk entitas daerah/wilayah ekonomi kelautan yang bergantung pada ekosistem laut, dan meluasnya kepemilikan laut secara adat. Pengaturan kelembagaan dan kapasitas teknologi dinilai menjadi komponen *enabler* ekonomi kelautan karena dapat memfasilitasi pencapaian keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial. Hal tersebut karena pengaturan kelembagaan seringkali gagal mengelola secara memadai persaingan penggunaan lingkungan laut di negara-negara maritim, dan untuk meningkatkan kesetaraan intra dan antar generasi.

Pengelolaan berbasis masyarakat seringkali diandalkan untuk mempertahankan aktivitas ekonomi kelautan, namun memerlukan integrasi yang lebih baik antara tingkat pengelolaan, serta pengaturan adat dan formal. Sementara itu, peningkatan kapasitas teknologi dapat meningkatkan efisiensi, perolehan dan pembagian pengetahuan, serta pemantauan dan pengawasan. Dalam beberapa kasus, jika digabungkan dengan pengelolaan yang efektif, inovasi teknologi akan meningkatkan produktivitas, misalnya perangkat pengumpul ikan di dekat pantai [21]. Kelima komponen yang diuraikan di atas berada dalam konteks politik dan budaya yang lebih luas.

Hubungan antar lembaga dan dinamika kekuasaan di antara pemilik sumber daya, pengguna dan elit, menentukan akses sumber daya dan kapasitas pengelolaan dengan membentuk pengaturan kelembagaan (yaitu aturan, tata kelola dan efektifitas penegakan hukum) dan siapa yang menjalankan kekuasaan. Lembaga-lembaga yang dihasilkan dapat bersifat formal (dan dapat ditegakkan secara hukum), atau informal yang berakar pada budaya dan tradisi. Ketika pengelolaan ekonomi kelautan oleh rezim atau elit politik yang berkuasa lemah, entitas non-pemerintah dan komersial dapat menetapkan agenda eksploitasi sumber daya.

Hal-hal tersebut menjadi sangat penting untuk menjadi atensi, terutama bagi pengampu kebijakan ekonomi kelautan karena hasil pembangunan ekonomi kelautan tidak hanya bergantung pada kapasitas, sumber daya dan kinerja, namun juga sangat bergantung pada keseimbangan kekuasaan antara kelas dan kelompok yang terkena dampak institusi tersebut (misalnya: masyarakat adat suatu daerah yang berpotensi terkena dampak/eksternalitas pembangunan kawasan wisata prioritas pemerintah di pesisir laut), yaitu pada penyelesaian sosial-politik.

Jika digabungkan dan digambarkan pada gambar 1.2, jelas bahwa konsepsi ekonomi kelautan merupakan perluasan kerangka pembangunan berkelanjutan, namun dengan fokus kelautan yang lebih kuat. Hal itu karena terdapat penekanan yang lebih besar pada keberlanjutan sosial dan budaya, karena terdapat potensi dominannya kepemilikan laut secara adat dan ikatan budaya yang kuat dengan lingkungan laut. Kerangka ekonomi kelautan tersebut juga memberikan perhatian yang lebih besar untuk memungkinkan pengaturan kelembagaan, hubungan kekuasaan dan pengaruh agen eksternal dibandingkan model keberlanjutan konvensional karena meningkatnya tekanan yang dirasakan oleh negara-negara kepulauan kecil.

Sementara itu, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) juga memiliki kerangka kerja pembangunan ekonomi kelautan [22], yang terejawantahkan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1.3. Kerangka Kerja Ekonomi Kelautan Model ASEAN
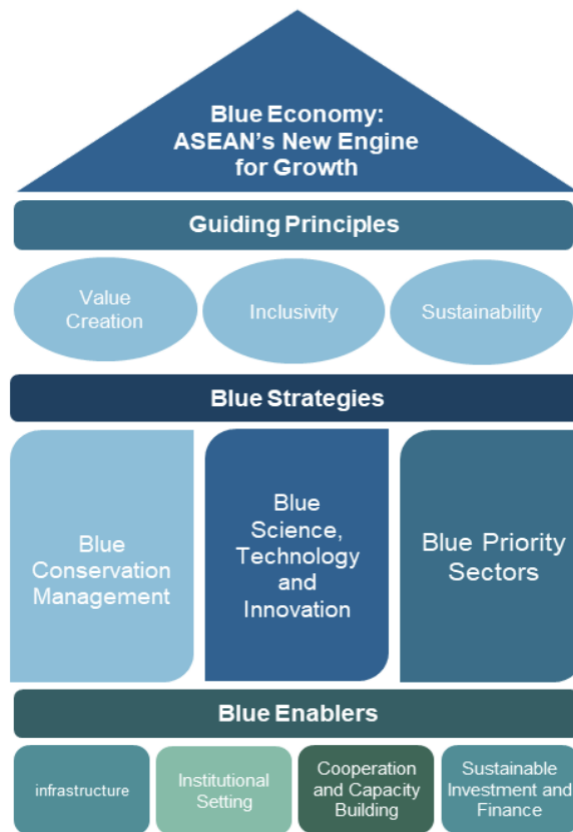
Sumber: ASEAN (2023)

Kerangka kerja tersebut bertujuan untuk memandu inisiatif ekonomi kelautan ASEAN, sekaligus mendorong integrasi dan kerja sama regional, serta memperkuat kapasitas para anggota ASEAN untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang perairan secara berkelanjutan. Kerangka ini akan berfungsi sebagai dokumen referensi mengenai ekonomi kelautan di ASEAN, dengan kemungkinan adanya mekanisme peninjauan berkala. Secara lebih spesifik, tujuan kerangka kerja ini adalah untuk:

a. Memastikan pendekatan lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, menciptakan rantai nilai, mendukung inklusivitas, dan memastikan keberlanjutan untuk menjadikan

ekonomi kelautan sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi ASEAN di masa depan.

b. Mengembangkan pemahaman bersama mengenai ekonomi kelautan; memberikan landasan bagi tindakan regional yang relevan dengan ekonomi ekonomi untuk memaksimalkan potensi ekonomi sumber daya perairan laut dan daratan ASEAN; dan mendorong tindakan kolaboratif dan/atau kerja sama di bidang-bidang seperti: perlindungan ekosistem laut dan pesisir; memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur; praktik budidaya dan penangkapan ikan yang berkelanjutan; pengembangan industri kelautan; ketahanan pangan, air, dan energi; perdagangan dan konektivitas; keamanan dan keselamatan navigasi; ilmu kelautan dan air tawar; energi berbasis perairan; tata kelola dan manajemen biru; bioteknologi; statistik data dan analisis data; penghidupan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan inovasi, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

c. Berfungsi sebagai dokumen referensi yang tidak mengikat untuk keterlibatan dan diskusi berkelanjutan mengenai ekonomi biru di antara negara-negara AMS dan antara ASEAN dan mitranya.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, diperlukan prinsip-prinsip panduan penerapan (*guiding principles*) yang memandu pengambilan keputusan dan tindakan terkait pengembangan dan penerapan ekonomi kelautan di ASEAN, termasuk menyesuaikan aktivitas yang ada yang mungkin tidak berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan mengembangkan peluang baru. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari:

a. *Value Creation* (Penciptaan Nilai). Penciptaan nilai menekankan perlunya menghasilkan nilai ekonomi sambil memanfaatkan sumber daya air laut dan daratan secara bertanggung jawab. Mengadopsi pendekatan ekonomi sirkular dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan prinsip ini dengan mendorong pembagian, penggunaan kembali, perbaikan, renovasi, dan daur ulang produk dan bahan yang ada. Penciptaan nilai dalam konteks perdagangan

intra dan antar kawasan juga mencakup memastikan pengembangan rantai nilai diantara anggota ASEAN dengan menurunkan hambatan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tanpa menimbulkan kerugian yang tidak semestinya terhadap lingkungan laut.

b. *Inclusivity* (Inklusivitas). Inklusivitas adalah prinsip yang menekankan pentingnya memastikan bahwa semua pemangku kepentingan – termasuk dunia usaha, seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), nelayan skala kecil, serta masyarakat lokal dan pesisir – memiliki akses terhadap manfaat perairan laut dan daratan yang berkelanjutan. pemanfaatan sumber daya. Dengan memasukkan dan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan, ekonomi kelautan akan mendapatkan manfaat dari pengetahuan dan keahlian lintas sektoral dan memastikan bahwa manfaat ekonomi didistribusikan secara adil. Inklusivitas juga dapat membantu membangun kohesi sosial, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat lokal dan pesisir secara keseluruhan, terutama ketika praktik peraturan yang baik diterapkan.

c. *Sustainability* (Keberlanjutan). Keberlanjutan mencakup kelestarian lingkungan dan sosial. Kelestarian lingkungan berfokus pada memastikan bahwa penggunaan sumber daya pesisir, laut, dan air tawar menawarkan perlindungan yang efektif terhadap lingkungan laut dari dampak berbahaya dan degradasi ekosistem sambil menjalankan kegiatan ekonomi kelautan. Hal ini mencakup pengelolaan oleh pemerintah dan masyarakat lokal untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan pesisir, air tawar, dan laut; memitigasi dampak perubahan iklim; dan melindungi keanekaragaman hayati. Sementara itu, keberlanjutan sosial berfokus pada memastikan bahwa manfaat dari penggunaan sumber daya perairan yang berkelanjutan didistribusikan secara adil dan mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas kemudian diterapkan dengan menggunakan strategi-strategi sebagai berikut:

a. *Blue Conservation Management* (Manajemen Konservasi Kelautan). Manajemen Konservasi memerlukan platform bersama dengan data dan metrik standar untuk menilai ekosistem laut yang diperlukan untuk pembuatan kebijakan kelautan berbasis ilmu pengetahuan. Dampak pencemaran terhadap ekosistem hulu mempengaruhi ekosistem hilir di wilayah pesisir dan lingkungan laut, sehingga diperlukan kebijakan pengelolaan ekosistem laut yang holistik dan terpadu. Strategi ini berpusat pada tiga bidang pembangunan: a) Menerapkan keseimbangan karbon netral dari aktivitas berbasis perairan dan pesisir; b) Mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, kesehatan ekologi, dan pemberantasan polusi; dan c) Meningkatkan ketahanan dan penguatan manajemen risiko bencana.
b. *Blue Science, Technology, and Innovation* (Pengetahuan Kelautan, Teknologi, dan Informasi). Strategi ini berfokus pada pemanfaatan kemajuan teknologi untuk pengembangan sektor-sektor yang relevan dengan ekonomi kelautan. Hal ini mencakup penggunaan ilmu pengetahuan, data, dan inovasi teknologi kelautan dan air tawar yang dapat meningkatkan efisiensi rantai nilai ekonomi kelautan, ketertelusuran, dan ketahanan serta memfasilitasi perdagangan di ASEAN (misalnya: platform digital, perangkat seluler, *big data* dan analitik, *blockchain*, kecerdasan buatan , dan pembelajaran mesin). Strategi ini berpusat pada bidang-bidang berikut: a) Mengatasi kesenjangan teknologi dan digital di antara anggota ASEAN; b) Meningkatkan efisiensi rantai nilai dengan menggunakan inovasi teknologi; c) Mengembangkan kerangka kebijakan teknologi; dan d) Mendorong dan mensinergikan lembaga think tank atau pusat penelitian ASEAN.
c. *Blue Priority Sectors* (Sektor Prioritas Kelautan). Secara regional, kemajuan di tingkat ASEAN dalam memanfaatkan ekonomi kelautan sebagai episentrum pertumbuhan baru memerlukan kapasitas dan "*good will*" nasional untuk bergerak maju. Oleh karena itu, strategi prioritas kelautan perlu berfokus pada peningkatan potensi ekonomi kelautan nasional dengan mengangkat dan memanfaatkan peluang di

sektor-sektor tradisional (seperti: penangkapan ikan yang berkelanjutan, budidaya perikanan berkelanjutan; konservasi pariwisata dan warisan budaya, transportasi dan jasa perairan, serta pelabuhan ramah lingkungan), dan menciptakan kondisi yang tepat bagi sektor-sektor berkembang (turbin angin lepas pantai, tenaga surya terapung, energi pasang surut dan panas dalam) untuk maju.

Strategi-strategi tersebut kemudian perlu dioperasionalisasi melalui elemen pengungkit (*blue enablers*) yang terdiri dari:

a. Infrastruktur. Mewujudkan potensi ekonomi kelautan memerlukan pembangunan infrastruktur fisik yang modern dan efisien, seperti: pelabuhan, dermaga, dan struktur perlindungan pantai dan tepian sungai. Infrastruktur tersebut akan membantu meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi pergerakan barang dan jasa, meningkatkan efisiensi rantai pasokan, dan mengurangi biaya transaksi. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk membiayai proyek infrastruktur yang mendukung penggunaan sumber daya perairan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dan kerja sama/peningkatan kapasitas saling terkait dalam membentuk inklusivitas dan efektivitas ekonomi kelautan.
b. Pengaturan Institusional. Hukum regional dan nasional, kerangka kebijakan, struktur tata kelola, dan mekanisme kelembagaan diperlukan untuk menghasilkan lingkungan kelembagaan yang tepat untuk transisi menuju ekonomi kelautan di ASEAN. Sebagai konsep lintas sektoral yang melibatkan banyak sektor berbeda, ekonomi kelautan memerlukan koordinasi untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berkelanjutan dan saling memperkuat. Struktur dan kebijakan tata kelola yang efektif mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor dan wilayah, sehingga mendorong upaya kolaboratif dalam ekonomi kelautan.
c. Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas. Program peningkatan kapasitas dapat mencakup pelatihan teknis dan kejuruan, pendidikan, dan pelatihan kerja untuk membantu pekerja memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di

berbagai sektor ekonomi kelautan. Selain itu, peningkatan keterampilan dapat membantu mendorong inovasi, efisiensi, dan produktivitas dalam ekonomi kelautan, yang mencakup pelatihan mengenai teknologi baru, seperti aquaponik atau energi terbarukan, atau pengembangan keterampilan lunak, seperti kewirausahaan dan kepemimpinan, juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM.

d. Investasi dan Keuangan Berkelanjutan. Lingkungan investasi dan pembiayaan harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa transisi ekonomi kelautan didukung dengan baik, dan tidak bergantung pada bantuan pembangunan atau proyek-proyek yang berumur pendek. Selain itu, dengan menyalurkan dana ke proyek-proyek yang memprioritaskan pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat, mekanisme pembiayaan berkelanjutan dapat mempercepat penciptaan infrastruktur modern yang diperlukan untuk berbagai kegiatan ekonomi kelautan. Pada gilirannya, infrastruktur yang terencana dengan baik dan berkelanjutan akan lebih meningkatkan daya tarik sektor ini bagi investor, sehingga menciptakan umpan balik positif yang mendorong investasi lebih lanjut dalam ekonomi kelautan.

POTENSI EKONOMI KELAUTAN KOTA BANDA ACEH

Provinsi Aceh menyimpan potensi ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang sangat besar, meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya (laut, payau dan air tawar), pengolahan hasil perikanan dan juga pariwisata bahari. Luas daratan Provinsi Aceh sebesar 57.365,67 km2, sedangkan luas perairannya mencapai 295.370 km2 yang terdiri dari 56.563 km2 berupa perairan teritorial dan kepulauan serta 238.807 km2 berupa perairan zona ekonomi ekslusif (ZEE), dengan panjang garis pantai mencapai 2.666,3 km. Oleh karena itu, sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor unggulan yang akan memberikan kontribusi besar pada pembangunan Provinsi Aceh, apabila pemanfaatannya dilakukan secara optimal[23]. Geohidrologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah

barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa. Terdapat 7 (tujuh) sungai yang melalui Kota Banda Aceh dan berfungsi sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku, kegiatan perikanan, dan sebagainya.

Aceh selain dikenal sebagai Kota Serambi Mekkah juga memiliki banyak tempat wisata alam yang eksotis dan mempesona. Aceh memiliki pesona alam yang indah, terutama yang berhubungan dengan kelautannya, sehingga memiliki daya tarik bagi wisatawan. Karena kaya akan alamnya, menjadikan Kota Banda Aceh sebagai salah satu Kota yang memiliki potensi ekonomi kelautan. Tempat wisata merupakan salah satu potensi ekonomi kelautan yang paling banyak terdapat di Provinsi Aceh. Di Kota Banda Aceh sendiri, tempat wisata yang banyak diminati oleh Masyarakat Aceh adalah Pelabuhan dan Dermaga Ulee Lheue yang terletak di Kecamatan Meuraxa, dari Dermaga ke Pelabuhan Ulee Lheue, mata akan dimanjakan dengan indahnya panorama laut dengan berbagai jajanan kuliner yang tersaji di sepanjang jalan dari Dermaga menuju Pelabuhan Ulee Lheue. Potensi ekonomi kelautan di Kota Banda Aceh tidak hanya terbatas pada tempat wisata saja, potensi ekonomi kelautan juga mencakup di bidang ekonomi, perdagangan, sumber daya laut, dan industri kelautan.

Selain di Desa Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, potensi ekonomi kelautan di Kota Banda Aceh juga terdapat pada Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam, segaris dan sejalan dengan Desa Ulee Lheue yang terletak di ujung Kota Banda Aceh. Desa Lampulo terdapat Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang Bernama TPI Lampulo. DI TPI ini tempat kapal-kapal nelayan berlabuh untuk mendaratkan seluruh ikan hasil tangkapannya dari laut. Saat ini Desa Lampulo juga sedang dalam tahapan peningkatan vegetasi mangrove di kawasan pesisir pantai Lampulo dengan di bangunnya Mangrove Park Lampulo (MPL) di Desa tersebut. Berikut potensi ekonomi kelautan yang terdapat di Desa Ulee Lheue dan Desa Lampulo Kota Banda Aceh.

1. Sumber Daya Perikanan Kota Banda Aceh

Laut Aceh kaya akan potensi perikanannya, terbukti dengan mata pencaharian sebagian besar masyarakat pesisir Aceh merupakan nelayan. Hal ini didukung dengan terdapatnya Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di wilayah perkotaan Banda Aceh di daerah

Lampulo Kecamatan Meuraxa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh tahun 2023 menjabarkan bahwa kelompok nelayan paling banyak terdapat di Kecamatan Meuraxa dan jumlah nelayan dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Hal ini menerangkan bahwa mata pencaharian sebagai nelayan begitu menjanjikan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir Pantai khususnya di Kecamatan Meuraxa, walaupun Kecamatan ini berada di Tengah Kota Banda Aceh, tetapi karena Potensi Ekonomi Kelautan yang terdapat di wilayah ini besar, sehingga tak sedikit masyarakat yang bergantung hidup dengan mata pencaharian sebagai nelayan, seperti ditunjukkan pada data berikut ini [24]:

Tabel 2.1. Jumlah Nelayan dan Petani Ikan di Kota Banda Aceh, 2018 - 2022

No.	Jenis Nelayan *Fishermans Type*	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nelayan/ *Fisherman*	1 300	1 300	2 500	1 192	1 188
2.	Petani Ikan/ *Fishery Farmers*	401	401	436	721	822
	Jumlah *Total*	**1 701**	**1 701**	**2 936**	**1 913**	**2 010**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh (2023)

Di dermaga Ulee Lheue, selain menjadi tempat keberangkatan dan pendaratan bagi masyarakat dari dan ke Pulo Aceh, juga difungsikan sebagai tempat pendaratan para nelayan lokal. Setiap pulang melaut di pagi dan sore hari, masyarakat sudah menunggu hasil tangkapan ikan segar tersebut di tempat ini. Di dermaga ini juga terdapat kapal nelayan apung yang awalnya dijadikan sebagai warung makan dan tempat berkumpulnya nelayan setiap para nelayan hendak dan selesai melakukan aktivitas mereka di laut. Tak jarang para pengunjung juga berasal dari masyarakat yang ingin merasakan nikmatnya makan di warung makan terapung nelayan.

Tabel 2.2. Jumlah Kelompok Tani Tambak dan Nelayan Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2022

Kecamatan *Subdistrict*		Kelompok Tani Tambak *Fishpond Farmer Group*	Kelompok Nelayan *Fisherman Group*
(1)		(2)	(3)
1. Meuraxa		2	39
2. Jaya Baru		-	6
3. Banda Raya		-	3
4. Baiturrahman		-	1
5. Lueng Bata		-	-
6. Kuta Alam		2	15
7. Kuta Raja		3	32
8. Syiah Kuala		4	30
9. Ulee Kareng		-	-
Jumlah *Total*	2022	48	126
	2021	37	115
	2020	48	107

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh (2023)

Pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa di 9 (Sembilan) Kecamatan yang terdapat di Kota Banda Aceh, Kecamatan Meuraxa memiliki jumlah kelompok nelayan terbanyak dibandingkan dengan 8 (delapan) Kecamatan lainnya, yang artinya jumlah para nelayan juga paling banyak terdapat di Kecamatan Meuraxa lokasi pelabuhan Ulee Lheue, Dermaga Ulee Lheue dan PPI Masrayakat Aceh Berada. Di wilayah ini juga tersebar dengan tambak ikan, jaring, dan keramba. Jika berjalan dari daerah Ulee Lheue ke daerah pusat Kota Banda Aceh dengan menggunakan alternatif jalan belakang, maka di sepanjang perjalanan akan disuguhi oleh pemandangan perikanan tangkap dan tambak ikan yang berada di sisi kiri dan kanan jalan. Belum lagi hasil produksi ikan-ikan tambak dan ikan-ikan tangkap laut juga dijual di sepanjang pinggir jalan tersebut. Berbagai macam ikan segar dapat kita jumpai di jalan ini.

Tentu ini sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar dan juga membantu masyarakat untuk memperoleh ikan segar dengan mudah. Masyarakat tidak harus jauh-jauh datang ke pasar untuk mencari dan membeli ikan segar. Namun demikian, terdapat dampak negatif akibat menjamurnya para penjual ikan dadakan, sehingga jalan yang seharusnya digunakan sebagai sarana bagi pengguna kendaraan terganggu akibat aktivitas pengguna jalan lainnya yang tidak berkepentingan untuk mencari

dan membeli ikan. Hal ini perlu perhatian dari pemerintah dalam menertibkan dan menerapkan kebijakan agar seluruh masyarakat tidak terganggu terhadap aktivitas yang muncul setiap limpahan ikan yang di dapat oleh para nelayan dan petani tambak.

Di daerah pelabuhan Ulee Lheue sendiri banyak terdapat masyarakat yang memancing di pinggiran pemecah ombak untuk mendapatkan ikan tangkapan. Selain itu, di dermaga Ulee Lheue juga sering dijadikan tempat transaksi jual beli ikan segar antara masyarakat dan para nelayan yang baru pulang melaut di sore hari. Para nelayan membawa tangkapan ikannya langsung ke dermaga untuk dijual ke masyarakat dan para *Mugee* yang akan menajajakannya ke pasar. Berikut beberapa gambar aktivitas masyarakat di sekitaran Ulee Lheue.

Gambar 2.1. Potret Masyarakat Memancing di Sekitar Pemecah Ombak Pelabuhan Ulee Lheue

Sumber: Kompas TV

Gambar 2.2. Kawasan Keramba Ikan Ulee Lheue

Sumber: KBA.ONE

Gambar 2.3. Dermaga Ulee Lheue

Sumber: diskominfo.bandaacehkota.go.id

Gambar di atas adalah beberapa dari sekian banyak potensi ekonomi kelautan yang dapat ditemui di Desa Ulee Lheue. Masyarakat terus meningkatkan budidaya perikanan tangkap dengan menangkarnya pada keramba yang dibuat dan dibangun sedemikian rupa agar perekonomian dapat lebih meningkat. Begitu pula dengan Dermaga Ulee Lheue Kota Banda Aceh yang hari-hari ini ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar, bukan hanya untuk tempat ekowisata, tetapi juga setiap sore tempat ini berubah menjadi tempat penjualan dan pembelian ikan segar hasil tangkapan nelayan yang baru selesai melaut.

Gambar 2.4. Aktivitas Penjualan Ikan di Sepanjang Pinggir Jalan Kecamatan Meuraxa

Sumber: ANTARA News

Aceh merupakan salah satu wilayah yang kaya akan perikanan tangkap lautnya, yang harus dilestarikan dengan mengimplementasikan kebijakan penangkapan ikan yang berkesinambungan, dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem. Hal tersebut penting karena eksploitasi sumber daya perikanan yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan stok ikan, mengancam mata pencaharian nelayan serta keberlanjutan ekosistem laut.

1. Ekosistem Karang dan Keanekaragaman Hayati Laut Kota Banda Aceh

Tidak hanya dengan sumber kekayaan ikan laut nya, Kota Banda Aceh juga kaya akan terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut. 2 (dua) hal ini merupakan daya tarik utama bagi pariwisata laut. Oleh karena itu, agar daya tarik ini tidak punah oleh tangan manusia, perlu dilakukan upaya perlindungan bagi ekosistem terumbu karang yang masih baik, rehabilitasi terhadap ekosistem terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut dari kerusakan seperti pencemaran, penangkapan ikan yang merusak, maupun perubahan iklim.

Namun demikian, fakta saat ini menunjukkan Pantai Ulee Lheue Banda Aceh sangat tercemar dan rusak akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Di sepanjang pesisir pantai dipenuhi oleh berbagai macam sampah yang tidak terurai dan juga abrasi laut yang disebabkan karena perubahan iklim yang sangat ekstrim.

Gambar 2.5. Potret Kawasan Pantai Ulee Lheue Banda Aceh yang Tercemar

Sumber: ANTARA News, RMOLAceh

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa ekosistem pesisir pantai mulai terancam, campur tangan pemerintah tentunya sangat dibutuhkan agar ekosistem pesisir pantai yang merupakan salah satu potensi ekonomi kelautan dapat terjaga kelestariannya.

2. Hutan Mangrove dan Ekosistem Pesisir Kota Banda Aceh

Dewasa ini sangat disadari bahwa mangrove dan ekosistem pesisir pantai memiliki peran penting dalam perlindungan garis pantai dari abrasi, mempertahankan dan melestarikan keaneka-ragaman hayati sebagai salah satu tempat pemijahan dan penetasan ikan. Oleh karena itu, perlindungan, rehabilitasi vegetasi pantai, restorasi hutan mangrove dan ekosistem pesisir pantai sangat penting dilakukan untuk melindungi wilayah pesisir dari bencana alam dan abrasi serta mendukung sektor perikanan dan pariwisata laut.

Dari 2 (dua) Kawasan/Desa di Kota Banda Aceh yaitu Desa Ulee Lheue dan Desa Lampulo yang merupakan kawasan yang potensial dalam pembangunan ekonomi kelautan, saat ini mangrove sedang digalakkan dan di vegetasikan pemeliharaannya di Desa Lampulo. Pemerintah Aceh bahkan sampai membuat dan membangun Mangrove Park Lampulo (MPL) di Desa tersebut demi kelestarian potensi ekonomi kelautan yang terjaga. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang mengusung program dan konsep *Aceh Green*. Salah satu Program Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang menunjang *Aceh Green* yaitu:

a. Program perlindungan dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan; serta
b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.

Program *Aceh Green* merupakan bentuk komitemen Pemerintah Aceh terhadap penyelamatan lingkungan dan pembangunan Aceh yang berwawasan lingkungan. Program ini dicanangkan pada masa Gubernur Irwandi dan Nova Iriansyah di tahun 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini. Sasaran tujuan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang berkenaan dengan *Aceh Green* terkait dengan bidang kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

a. Bertambahnya luas kawasan konservasi laut dan pesisir.
b. Meningkatkan rehabilitasi vegetasi pantai dan vegetasi mangrove di kawasan pesisir [23].

Gambar 2.6. Kawasan Potensi Ekonomi Kelautan Desa Lampulo

Sumber: ANTARA News

Gambar 2.7. Kawasan Mangrove Park Lampulo (MPL)

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Di Kawasan Laut Ulee Lheue saat ini sudah terlihat beberapa tanaman mangrove yang dilestarikan dan di vegetasikan oleh masyarakat setempat. Masyarakat mulai sadar arti penting akan lestari alam demi keberlangsungan hidup keanekaragaman hayati dan pencegahan terhadap abrasi pantai dan sungai. Walau belum begitu mendapat perhatian penuh oleh Pemerintah Aceh terhadap kelestarian mangrove di kawasan tersebut, tetapi pemerintah desa setempat bersama dengan beberapa kelompok kerja masyarakat dan lembaga swadaya yang konsen akan hal tersebut, sudah mulai mengambil peran untuk menjaga dan melestarikan daerah / kawasan tersebut.

Lebih lanjut, menjaga lingkungan laut agar tetap bersih dan bebas pencemaran merupakan hal yang sangat penting demi keberlangsungan kehidupan laut. Satwa laut seperti ikan, burung laut dan mamalia laut lainnya serta keanekaragaman hayati yang banyak terdapat di dalam dan sekeliling laut adalah entitas penting yang harus dilestarikan bersama. Urgensinya, agar keberlangsung-an dan rantai makanan tidak terputus akibat kerusakan, polusi laut dan pencemaran yang dibuat oleh manusia. Salah satu upaya untuk mengurangi polusi laut dan sejenisnya adalah dengan melakukan pengolahan limbah yang baik secara terus menerusi, ikut menjaga

kelestarian, serta tidak mencemari laut dengan sampah yang tidak terurai juga merupakan hal yang harus dijaga konsistensinya.

Gambar 2.8. Aktivitas Menjaga Kebersihan Pantai dari Sampah Tidak Terurai

Sumber: ANTARA News

Gambar 2.9. Kawasan Pantai Ulee Lheue

Sumber: Brief.id

Lingkungan laut yang bersih membuat para wisatawan lebih dapat menikmati pemandangan yang indah seperti pada gambar 2.9 di atas. Selain itu, dengan lingkungan laut yang bersih membuat masyarakat (khususnya wisatawan) berdatangan ke tempat ini dengan membawa keluarganya untuk sejenak melepas penat di sore hari atau di akhir pekan. Peningkatan ekonomi daerah setempat juga jadi terbantu apabila daerah yang dikunjungi nyaman dan bersih.

3. Tradisi Nelayan dan Kearifan Lokal

Tradisi nelayan Aceh merupakan warisan budaya yang tidak ternilai harganya dan harus dijaga kelestarian sebagai identitas masyarakat pesisir Aceh. Perlindungan dan pengakuan terhadap hak para nelayan dan pemanfaatan sumber daya laut berdasarka kearifan lokal yang terdapat di Aceh dapat mendukung dan menjaga keberlanjutan potensi ekonomi kelautan di Aceh.

Salah satu tradisi nelayan dan kearifan lokal yang terdapat di Aceh adalah adanya Lembaga Adat Laut dan Hari Pantang Melaut. Lembaga Adat Pangloma Laot ini bahkan satu satunya di Indonesia. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Aceh memiliki warisan leluhur tersebut, yang hingga saat ini telah dilindungai oleh Undang-Undang. Lembaga Adat Laut Aceh yang dipimpin oleh seorang Ketua atau disebut dengan Panglima Laot yang keberadaannya telah ada sejak jaman kesultanan Aceh dahulu (sebelum kolonial Belanda masuk ke Indonesia). Hingga kini aturan turun temurun yang di buat oleh Lembaga Adat Laut Aceh ini tidak berani dilanggar oleh Masyarakat Aceh.

Salah satu aturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Laut Aceh ini adalah Hari Pantang Melaut (HPM), Jika di total dalam 1 (satu) Tahun ada 60 (enam puluh) HPM atau sekitar 2 (dua) bulan. Jumlah hari tersebut tidak termasuk ketika nelayan tidak melaut karena cuaca buruk dan sebab alam lainnya. HPM yang membuat para nelayan Aceh tidak melaut adalah seperti setiap hari Jumat, hari – hari besar keagamaan, hari raya umat muslim, dan bahkan saat ini setiap tanggal 26 Desember dan 3 hari setelahnya juga masuk ke dalam HPM untuk memperingati dan mengenang bencana Tsunami Aceh 2004 silam.

Selain itu, aturan lain yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Laut Aceh adalah para nelayan dilarang untuk menggunakan pukat harimau, bom dan racun dalam menangkap ikan. Hal ini tentu saja dilakukan agar kelestarian ekosistem laut dapat terjaga dengan baik. Kearifan lokal yang dimiliki ini tentunya sangat ramah lingkungan dan berdampak positif terhadap keberlangsungan hidup ekosistem laut Aceh. Jika ada yang melanggar, maka Panglima Laot melalui Lembaga Laut Adat Aceh akan mengenakan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar. Hukuman yang keras sangat ditegakkan dalam pelanggaran yang dilakukan termasuk pada penyitaan hasil tangkapannya.

Begitu juga jika ada para nelayan Aceh yang tidak pulang selama berhari-hari dari laut, para keluarga akan menemui Panglima Laot untuk dapat melaporkan anggota keluarganya, sehingga Panglima Laot dalam menghubungi pihak nelayan di negara perbatasan bahkan akan membuka komunikasi dengan Duta Besar di wilayah tersebut agar mendapat informasi dan pendampingan terhadap para nelayan yang sedang bermasalah karena melanggar garis batas Pantai.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tugas dari Lembaga Adat Laut Aceh tidak hanya membuat aturan, memberikan sanksi dan atau mengawasi nelayan dalam proses melaut dan mencari nafkah dari hasil tangkapan laut saja, tetapi juga ikut andil dalam setiap permasalahan nelayan yang terjadi di laut lepas, membantu nelayan Aceh yang terdampar atau tertangkap di negara lain hingga membantu proses pemulangan-nya ke keluarganya kembali.

Gambar 2.10. Lambang Lembaga Adat Laut Aceh

Sumber: https://www.panglimalaotaceh.org/

Tradisi nelayan lainnya yang terdapat di Aceh adalah tradisi *Tarik Pukat* (jaring ikan) yang dilaksanakan menjelang maghrib pada pesisir pantai Ulee Lheue dan Gampong Pandai. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun oleh para leluhur nelayan Aceh. Pukat atau jaring disebar pada pagi hari di pinggiran pantai dan menjelang senja, para nelayan akan beramai ramai untuk menarik pukatnya dan memilih ikan yag terjaring pada pukat tersebut. Kegiatan ini sering ikut disaksikan oleh masyarakat dan para pengendara kendaraan yang kebetulan melintas didaerah tersebut. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang ditunggu oleh seluruh kalangan masyarakat di sekitar, karena setelahnya mereka juga ikut mengutip ikan yang tersangkut pada pukat tersebut.

Gambar 2.11. Tradisi Tarik Pukat Pantai Ulee Lheue

Sumber: AJNN.net

4. Keberlanjutan Industri Kelautan Kota Banda Aceh

Keberlanjutan industri kelautan di Kota Banda Aceh seperti seperti galangan kapal dan pabrik pengolahan ikan masih belum didasarkan pada prinsip keberlanjutan, belum sepenuhnya memadai, dan masih belum berdampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Pengelolaan galangan kapal dan pengolahan ikan di Desa Lampulo masih terbatas pada sektor swasta masyarakat dan dalam skala kecil. Padahal dengan jumlah nelayan dan kapal yang dimiliki oleh masyarakat, industri galangan kapal menjadi suatu hal yang penting.

Sama halnya denga pabrik pengolahan ikan. TPI Lampulo memiliki satu pabrik pengolahan ikan yang juga dimiliki oleh swasta/masyarakat. Pada Tahun 2020 TPI Lampulo memiliki 1 pabrik pengolahan ikan tuna untuk di ekspor ke luar negeri milik PT. Yakin Pasifik Tuna (YPT). Pada saat ini, pemerintah menyambut dengan baik atas berdirinya pabrik pengolahan ikan tuna ekspor tersebut, tetapi saat ini denyut dan gaungnya tidak terdengar lagi. Padahal dengan adanya pabrik pengolahan ikan tersebut tentu akan meningkatkan taraf ekonomi para nelayan dan masyarakat sekitarnya.

Saat ini keberlanjutan industri kelautan dalam hal pengolahan ikan lebih dikuasai oleh masyarakat dengan mengatasnamakan UMKM. Masyarakat pesisir pantai Lampulo memanfaatkan lahan di rumah dan di lingkungan rumah terhadap hasil tangkapan laut nelayan untuk mengolah ikan menjadi lebih bernilai, seperti *keumamah* atau ikan kayu, ikan asin, dan jenis pengolahan ikan lainnya dengan metode manual. Tentu hal ini kurang memberi nilai tambah pada produk yang dihasilkan oleh masyarakat, padahal seperti diketahui bahwa laut Aceh kaya akan hasil lautnya yang sangat mungkin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat apabila dikelola dengan baik dan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Gambar 2.12. Limpahan Hasil Laut Aceh

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Gambar 2.13. Pengolahan Ikan Kayu Secara Manual

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Limpahan hasil laut Aceh yang setiap hari didapat oleh para nelayan Aceh menjadi kurang bernilai hasilnya karena belum dapat diolah dengan baik, pengelolaan dan sentuhan dari pemerintah yang kurang sehingga menurunkan nilai jual. Apabila dikelola dengan baik, bisa di ekspor hingga ke luar negeri.

5. Destinasi Wisata Laut Kota Banda Aceh

Wisata laut di pelabuhan dan dermaga Ulee Lheue hingga saat ini masih terjaga kelestariannya, sehingga tidak hanya masyarakat Aceh yang sering mengunjungi kawasan tersebut, tetapi juga wisatawan luar. Kawasan pantai Ulee Lheue ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Hal ini tentu saja memberikan kontribusi positif terhadap perekonimi-an lokal.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) pada pertengahan tahun 2022 lalu berkunjung ke Aceh dan mendatangi Desa Wisata Ulee Lheue dengan tujuan untuk melihat kearifan lokal yang terdapat di kawasan tersebut. Desa Ulee Lheue termasuk ke dalam 50 besar Desa terbaik untuk penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2022. Menparekraft pada saat berkunjung ikut serta merasakan kegiatan *tarek pukat* (jaring ikan) yaitu sebuah cara tradisional Aceh dalam menangkap ikan dengan para nelayan di pesisir pantai Lampulo seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.14. Menparekraft Turut Merasakan Kegiatan Tarek Pukat

Sumber: https://dispar.bandaacehkota.go.id/

Wisata laut yang disajikan pada Pantai Ulee Lheue ini seperti panorama yang indah, aneka jajanan, dayung perahu angsa, wisata dermaga, pemancingan, arena bermain anak dan masih banyak hal lainnya. Setiap sore, jalan di menuju Pelabuhan Ulee Lheue ini sangat padat dan ramai oleh pengunjung ditambah dengan para

penjual yang menawarkan kopi, jagung bakar, kelapa muda dan banyak jajanan lainnya. Tempat ini juga menjadi tempat pertemuan anak-anak muda Aceh, tidak hanya para keluarga yang mendatangi tempat ini, menghabiskan senja di tempat ini sambil menunggu waktu magrib adalah hal yang digemari oleh masyarakat dan wisatawan.

Gambar 2.15. Potret Desa Wisata Pantai Ulee Lheue
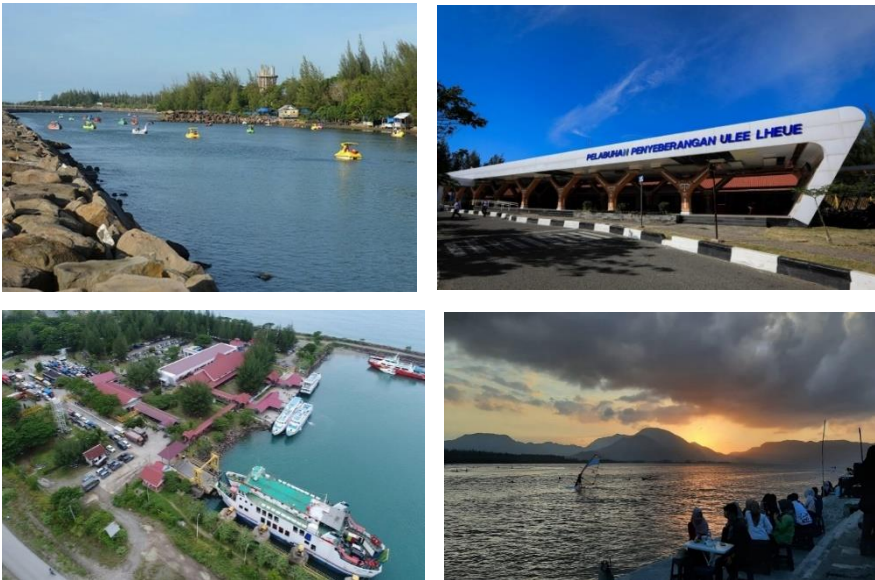
Sumber: ANTARA News,Dishub Kota Banda Aceh, Masakini.co

Dalam hal mengoptimalkan potensi ekonomi Kelautan Aceh secara berkelanjutan, sangat dibutuhkan dukungan dari semua pihak yang terlibat pada sektor kelautan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan terhadap potensi ekonomi kelautan Aceh. Pemerintah, Swasta, Masyarakat, Lembaga Adat Laut Aceh, pihak Akademisi dan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat wajib mengambil peran dalam dukungan terhadap penelitian ilmiah tentang ekosistem laut, pengelolaan sumber daya alam, dan teknologi kelautan harus menjadi prioritas, untuk menyelesaikan tantangan yang ada dan mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan secara berkelanjutan dapat terwujud dan terimplemen-tasi.

Rapat koordinasi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh, seminar-seminar yang diadakan baik oleh pihak Akademisi Kampus dan Pihak Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk didalamnya peran dari UMKM dan Masyarakat yang ikut serta dalam penelitian dan pengembangan Potensi Ekonomi Kelautan merupakan suatu langkah baik yang harus dijaga kesinambungan-nya agar dapat terus berlanjut.

Gambar 2.16. Seminar Perikanan dan Kelautan

Sumber: humas.acehprov.go.id, usk.ac.id

Potensi ekonomi kelautan yang begitu besar seperti ini tentunya harus dimanfaatkan dengan baik dan benar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Aceh. Namun demikian, Potensi Ekonomi Kelautan juga harus dilakukan secara berkesinambungan dan lestari agar tidak merusak lingkungan laut dan pesisir. Masyarakat dan tentunya Pemerintah juga harus turut serta dalam melestarikannya, tidak hanya diambil manfaatnya saja. Oleh karena itu, perlu adanya implementasi kebijakan ekonomi kelautan dari pemerintah yang mendukung seluruh potensi dan kemajuan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan lestari di Kota Banda Aceh.

BAB III.

STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI KELAUTAN KOTA BANDA ACEH DARI PERSPEKTIF MANAJEMEN

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan. Optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi pada Jurnal Governance, optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha, sehingga optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan agar terwujudnya keuntungan yang diinginkan. Dari seluruh uraian diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan baawa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam bentuknya sebagai penyelenggaraan organisasi

senantiasa tujuan diarahkan secara efektif dan efisien agar tujuan dapat tercapai secara optimal [25].

Konsep *Blue Economy* di Indonesia mencakup empat aspek. Pertama, aspek ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan keselamatan dan efisiensi kegiatan kelautan, termasuk pengelolaan tangkapan ikan, menjaga keamanan laut, dan mencegah peningkatan pencemaran laut. Kedua, aspek sosial harus menjamin penghidupan yang layak dan berkelanjutan bagi nelayan, serta meningkatkan peran laut dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan nelayan hingga pelaut, mengembangkan industri pengolahan ikan, meningkatkan efisiensi pelabuhan, dan memperluas akses pasar global. Selain itu, potensi kelautan juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong peran perempuan dalam perekonomian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kelompok masyarakat nelayan. keempat, *blue economy* berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup dengan membersihkan perairan dan pantai, mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca dari armada laut, pariwisata dan perikanan yang lebih bertanggung jawab, dan mengintegrasikan pengelolaan wilayah pesisir [26]

Model bisnis *blue economy* dapat diterapkan penduduk Kota Banda Aceh yang memanfaatkan sektor perikanan dan kelautan sebagai mata pencaharian mereka. Model bisnis tersebut bukan hanya melibatkan nelayan, tetapi juga wirausahawan yang mengembangkan hasil olahan produk perikanan dan kelautan. Implikasinya bagi para produsen hasil laut adalah produksi laut yang dihasilkan mereka juga memperhatikan keberlangsungan ekosistem laut, pengelolaan hasil laut yang *zero waste,* serta melarang praktik o*ver exploitation*. Masyarakat daerah pesisir yang awalnya hanya berfokus untuk menangkap ikan saja, saat ini dapat mengembangkan potensi dari sektor perikanan dan kelautan. Tidak hanya diversifikasi hasil laut, melainkan juga kerajinan tangan yang bisa menjadi ciri khas daerah.

Indonesia (khususnya Aceh) memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan perairan. Potensi ini mencakup berbagai sektor ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata, perdagangan,

perikanan, industri pengolahan kelautan, dan pemanfataan sumber daya laut. Dari sudut pandang ekonomi, potensi ekonomi kelautan yang terdapat di Kota Banda Aceh perlu dikaji lebih dalam pada penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan sektor dan sub-sektor perikanan dan kelautan. Hal itu penting agar keputusan yang akan diambil dan hasil kajian dari seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah antara berbagai *stakeholder* dari sektor pemerintahan, swasta, lembaga swadaya dan akademisi yang terlibat menjadi suatu rumusan yang baik bagi keberlanjutan ekonomi kelautan Kota Banda Aceh yang akan berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Aceh secara luas.

1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Telaahan Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia 2020-2024 adalah "*Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*". Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melaksanakan 4 misi utama yaitu:

a. Peningkatan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
b. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional.
c. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
d. Peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Dari penjabaran 4 (empat) misi tersebut, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan, dengan tujuan:
    1) Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan.
    2) Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.

b. Peningkatan kontribusi sektor ekonomi kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional dengan tujuan:
   1) Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
   2) Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.
c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
d. Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dan kemanan hayati ikan.
e. Optimalnya pengelolaan ruang laut [23].

Dari penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran diatas, dapat dilihat bahwa tujuan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, kemandirian fiskal daerah, dan ketahanan pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial ekonomi. Sementara itu, sasaran perangkat daerah DKP adalah:

a. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, dengan indikator kinerja utama:
   1) Nilai Tukar Nelayan (NTN).
   2) Nilai Tukar Petani Ikan (NTPI)
   3) Produksi perikanan: Produksi perikanan tangkap (ton), maupun produksi perikanan budidaya (ton).
b. Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, dengan indikator kinerja utama:
   1) Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%).
   2) Nilai ekspor perikanan (USD).
   3) Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun).
   4) Produksi garam (ton).
   5) Pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola (%).
   6) Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%) [27].

Tabel 3.1. Target Kerja Tahun 2023

No.	Indikator	Target Capaian Tahun 2023
1	Nilai tukar nelayan (NTN)	102,50
	Nilai tukar petani ikan (NTPi)	97,54
2	Produksi Perikanan (ton)	350.131,21
	- Produksi Perikanan Tangkap (ton)	237.214,46
	- Produksi Perikanan Budidaya (ton)	112.916,75
3	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,30
4	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	2.153.806,00
6	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	59,37
7	Produksi Garam (ton)	10.600,00
8	Pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola (%)	40,00
9	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perudang- udangan yang berlaku (%)	62,00

Sumber: Rakir Renja DKP Tahun 2023

Kebijakan nasional terhadap sektor kelautan dan perikanan yang kemudian diturunkan ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di atas menunjukkan kepedulian dan konsistensi pemerintah pusat dan daerah dalam menjadikan Banda Aceh sebagai Kota dengan basis ekonomi kelautan yang kuat, lestari, dan berkesinambungan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seluruh indikator kinerja yang ingin dicapai oleh pemerintah sangat ambisius dalam menentukan target kinerja. 9 (sembilan) indikator yang ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi tolak ukur bagi keberhasilan dan optimalisasi potensi ekonomi kelautan yang wajib dicapai demi keberlangsungan ekonomi kelautan di Bumi Serambi Mekkah.

Namun demikian, tidak semua potensi ekonomi kelautan yang ada di Kota Banda Aceh menjadi indikator kinerja utama pada DKP. Konsentrasi DKP dalam mengoptimalisasi potensi ekonomi kelautan haya sebatas perikanan, industri pengelolaan, perdagangan dan pemanfataan sumber daya lahan. Sedangkan potensi ekonomi kelautan dari sektor pariwisata laut, UMKM, tradisi nelayan, ekosistem karang, keanekaragaman hayati laut dan lingkungan laut yang bersih belum atau kurang menjadi perhatian.

Seharusnya peran strategis pemerintah harus mencakup semua sektor yang menjadi potensi ekonomi kelautan yang terdapat di Kota Banda Aceh agar optimalisasi yang diharapkan untuk seluruh lini kelautan dan perikanan dapat tercapai. Upaya pemerintah yang telah dilakukan merupakan langkah awal bagi sektor kelautan dan perikanan.

2. Peran Stretegis dan Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Potensi Ekonomi Kelautan

Pemerintah Aceh memiliki 4 (empat) program kerja yang harus dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang sesuai di bidangnya yaitu:

a. Aceh Meugo dan Melaot.
b. Aceh Pemeulia.
c. Aceh SIAT (Sistem Informasi Terpadu).
d. *Aceh Green*.

Dalam konteks program kerja yang berhubungan dengan sektor kelautan dan perikanan, Program Kerja yang pertama “Aceh Meugo dan Melaot” merupakan program kerja pemerintah Aceh yang mendukung kebijakan terhadap potensi ekonomi kelautan di Aceh. Adapun tujuan dan sasaran tujuan dari program kerja tersebut yakni:

a. Pembangunan ekonomi maritim melalui program instensifikasi dan ekstensifikasi.
b. Memperbaiki fasilitas dan teknologi perikanan serta jaringan pemasarannya.
c. Penyediaan sarana pendukung bagi nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas terhadap produk perikanan.
d. Meningkatkan eksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan.
e. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pada bidang kelautan dan perikanan.
f. Meningkatkan produk unggulan kelautan dan perikanan lokal yang kreatif, inovatif serta memiliki nilai ke khasan daerah [28].

Sejalan dengan program kerja Pemerintah Aceh, Program Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang menunjang tujuan dari "Program Kerja Meugo dan Melaot" adalah sebagai berikut:

a. Program pengembangan perikanan tangkap.
b. Program budidaya perikanan.
c. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasarana produksi perikanan.
d. Program pengembangan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
e. Program perencanaan Pembangunan ekonomi.
f. Program pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan.
g. Program pemberdayaan ekonomi Masyarakat pesisir [29].

3. Upaya Pemerintah dalam Mengoptimalisasi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Sarana dan Prasarana Perikanan.

Kegiatan yang bernilai ekonomis di wilayah pesisir Pantai Kota Banda Aceh meliputi perikanan tangkap yang terdiri dari perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Produksi perikanan tangkap ekonomis Aceh yang meliputi Kota Banda Aceh terdiri dari 15 jenis ikan dari kelompok ikan pelagis, kelompok ikan demersal, dan kelompok non-ikan (udang, *crustacea* dan *molusca*). Provinsi Aceh memiliki komoditi perikanan tangkap ekonomis dan bernilai ekspor antara lain tuna, cucut, tongkol, bawal putih, bawal hitam tenggiri, kerapu dan lobster. Kegiatan perikanan umum meliputi perikanan budidaya dilakukan di air tawar (kolam, keramba, keramba jaring apung, sawah), air payau (tambak), dan laut. Komoditas ekonomi di bidang perikanan budidaya, antara lain bandeng, udang windu, udang vaname, ikan mas, nila, lele, kerapu dan gurami [29].

Pelabuhan perikanan Lampulo yang mulai dibangun pada 2006, kini sedang dipersiapkan menjadi pelabuhan utama bertaraf Internasional. Pelabuhan ini memiliki kolam labuh 80 Ha, dimana 10 Ha diantaranya sedang dalam penyelesaian dan baru dapat menampung lebih kurang 200 kapal penangkap ikan berukuran di bawah 40 Gt. Sedangkan kapal yang nantinya melakukan aktivitas

dan merapat di pelabuhan perikanan Lampulo diperkirakan mencapai 400 unit lebih. Kolam labuh yang belum terbangun diharapkan segera dibangun agar pelabuhan ini kelak bisa menjadi pelabuhan ekspor [30].

Di samping kolam labuh, pemerintah Aceh juga sedang melengkapi pembangunan fasilitas darat lainnya seperti pabrik es, *cold storage* dan berlanjut kepada pabrik pengalengan ikan. Selama ini, bahan baku industri perikanan lebih dari 80% yang didapat dari perairan Aceh dibawa keluar, sehingga nilai tambahnya belum dapat dinikmati oleh para nelayan dalam upaya meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya. Oleh karena itu, kedepan pelabuhan perikanan Lampulo ini harus menjadi sentra industri perikanan tangkap harapan agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel 3.2. Nilai Produksi Perikanan menurut Sub-Sektor di Kota Banda Aceh (ribu rupiah), Tahun 2022

Subsektor *Subsector*		Produksi *Production* *(ton)*	Nilai Produksi *Value* (ribu rupiah/ *Thousand Rp*)
(1)		(2)	(3)
Perikanan Laut/ *Fishery*		22 665	369 347 233
Perikanan Tambak/ *Fishpond*		883	33 575 795
Jumlah ***Total***	**2022**	**23 548**	**402 923 028**
	2021	**17 736**	**292 288 365**
	2020	28 086	331 400 691

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh (2023)

Tabel 3.3. Jumlah Perahu / Kapal Perikanan Laut Menurut Kategori Perahu/Kapal di Kota Banda Aceh Tahun 2018 – 2022

Tipe *Type*	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perahu Tanpa Motor/ *Boat*	50	66	28	24	24
Motor Tempel/ *Motorboat*	34	35	-	-	-
Kapal Motor/ *Vessels*	761	763	748	876	880
- < 5 GT	421	423	382	385	389
- 5-10 GT	149	149	203	225	225
- 10-30 GT	100	100	55	99	99
- 30-100 GT	91	91	104	160	160
- > 100GT	-	-	4	7	7
Jumlah *Total*	**845**	**864**	**776**	**1 776**	**1 784**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh (2023)

Tabel 3.4. Jumlah Unit Penangkap Perikanan Laut Menurut Jenis Alat Penangkapan di Kota Banda Aceh Tahun 2018 - 2022

Jenis *Species*	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pukat Cincin	184	185	294	272	272
Jaring Insang Hanyut	215	218	152	152	152
Jaring Klitik	376	376	-	449	-
Pancing Tonda	-	-	-	-	-
Pancing Lainnya	376	376	-	449	453
Jumlah *Total*	**775**	**779**	**446**	**873**	**877**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh (2023)

Tabel 3.5 Data Bidang Tambak di Kota Banda Aceh Tahun 2018 – 2022

Kecamatan *Subdistrict*	Jumlah Petani Tambak *Farmer*	Jumlah Petak *Fishpond*	Luas Tambak *Fishpond Area (m2)*	Luas Tambak yang Telah Direhab *Rehabilitated (m2)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meuraxa	252	168	1.550.000	149.200
2. Jaya Baru	-	-	-	-
3. Banda Raya	-	-	-	-
4. Baiturrahman	-	-	-	-
5. Lueng Bata	-	-	-	-
6. Kuta Alam	151	43	499 000	393 000
7. Kuta Raja	159	37 661	6 398 000	80 000
8. Syiah Kuala	260	1 148	570 000	450 000
9. Ulee Kareng	-	-	-	-
Jumlah 2022	822	39 020	9 017 000	1 072 200
Jumlah 2021	721	39 020	9 017 000	1 072 200

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh (2023) [31]

Data-data yang bersumber dari dokumen Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023 di atas memperjelas dan mendukung bukti konkrit yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama 5 (lima) tahun terakhir dalam mengoptimalisasi potensi ekonomi kelautan yang terdapat di Kota Banda Aceh khususnya Kecamatan Meuraxa. Segala upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan nilai jual dan produksi kelautan dan perikanan serta didukung dengan sumber daya yang ada terus dimanfaatkan agar potensi ekonomi kelautan yang berlimpah di Aceh dapat menjadi salah satu indikator pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dan diupayakan agar terus berkelanjutan serta berkesinambungan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banda Aceh pada tahun 2016, terjadi peningkatan pertumbuhan kelompok perikanan, salah satu faktor keberhasilan atas pertumbuhan kelompok perikanan ini dikarenakan oleh optimalisasi pendampingan yang dilaksanakan oleh petugas teknis dalam meningkatkan kelembagaan dan produktifitas usaha kepada

para peaku usaha perikanan, keberhasilan tersebut telah memicu perubahan perilaku pemikiran usaha perikanan yang selama ini berusaha secara kelompok [32].

Begitu pula dengan produksi perikanan tangkap dan budidaya, Kota Banda Aceh merupakan sentra terbesar pendaratan ikan yang terdapat di Provinsi Aceh. Hampir seluruh armada dengan berbagai jenis komoditi perikanan didaratkan, produksi perikanan dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan. Hal ini sangat didukung oleh armada dan teknik penangkapan ikan yang diterapkan oleh nelayan di Kota Banda Aceh. Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberantas *illegal fishing* telah berdampak positif bagi usaha perikanan tangkap, meningkatkan ketersediaan sumberdaya ikan di perairan laut Aceh. Penerapan teknologi usaha penangkapan ikan telah berhasil meningkatkan produksi perikanan di Kota Banda Aceh sehingga membantu nelayan dalam meningkatkan taraf hidup mereka [32].

Tabel 3.6. Rumusan Cakupan Binaan Kelompok Nelayan

Bidang Urusan/ Indikator	Rumus	2012	2013	2014	2015	2016	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan Bantuan pemda tahun n / Jumlah Kelompok Nelayan X100%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	DKPP

Sumber: RPJMD Kota Banda Aceh

Gambar 3.7 Produksi Ikan

Bidang Urusan/ Indikator	Rumus	2012	2013	2014	2015	2016	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
Produksi Ikan	Jumlah Produksi Ikan (Ton) / Target Daerah (Ton) x 100%	88%	92%	93%	95%	98%	DKPP

Sumber: RPJMD Kota Banda Aceh

RPJMD Pemerintah Kota Banda Aceh juga menitik beratkan kelompok usaha nelayan untuk membantu produksi penangkapan ikan laut dan ikan budidaya. Kewirausahaan kelompok UMKM dan Kelompok Nelayan di bidang kelautan dan perikanan tak lepas dari salah satu usaha pemerintah daerah dalam membantu masyarakat menjalankan roda usahanya untuk peningkatan taraf hidup. Semua

itu tak lepas dari upaya pemerintah dalam mengoptimalisasi potensi ekonomi kelautan yang terdapat di Kota Banda Aceh. Pada RPJMD tahun 2012 -2016 dengan adanya binaan kelompok nelayan, jumlah produksi ikan menjadi meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2016 jumlah produksi ikan mencapai angka 98% dengan jumlah kelompok binaan nelayan yang tetap setiap tahunnya. Ini artinya kelompok binaan nelayan sangat produktif, konsisten, efektif dan efisen dalam menjalankan kegiatan kelautan dan perikanannya.

4. Permasalahan Terhadap Potensi Ekonomi Kelautan di Kota Banda Aceh yang Kurang Mendapat Perhatian oleh Pemerintah Daerah

a. Wisata Laut di Kota Banda Aceh terdapat pada Desa Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa, dari Pelabuhan penyebrangan antar pulau, dermaga laut tepi pantai, wisata kuliner di pinggir pantai, permainan air laut untuk anak-anak, taman bermain tepi laut, memancing di pemecah ombak pinggir pantai hingga tempat bersantai atau kafe pinggir pantai sambil menikmati senja ditawarkan di sepanjang pantai Ulee Lheue. Setiap sore dan akhir minggu tempat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat dan para wisawatan lokal dan manca negara untuk menikmati pemandangan. Tetapi sangat disayangkan, sentuhan dari pemerintah daerah belum maksimal dalam menawarkan daya tarik yang lebih menjual. Jika melihat ke Kota lain di Indonesia yang juga memiliki wisata laut seperti: Bali, Natuna, dan Lombok yang memiliki fasilitas wisata laut yang sangat bagus dan menarik. Pada beberapa Kota di Indonesia tersebut, wisata laut sudah sangat maju dengan adanya beberapa permaianan laut dan udara seperti jetski, paralayang air, pariwisata boat, wisata bawah air, dan masih banyak lagi lainnya yang saat ini di Kota Banda Aceh belum mendapat perhatian dari pemerintah terhadap hal tersebut. Hal ini jika diusahakan tentu saja akan menambah sumber pendapatan daerah.

b. Ekosistem Karang dan Keanekaragaman Hayati. Sama halnya dengan wisata laut, ekosistem karang dan keanekaragaman hayati laut lainnya di Pantai Ulee Lheue saat ini masih belum terjamah dan belum terkondisi dengan baik. Sehingga tidak

ada kesempatan bagi masyarakat maupun para wisatawan untuk dapat melihat ekosistem karang dan keanekaragaman hayati laut yang berada di laut Ulee Lheue. Para pengunjung hanya dapat melihat beberapa ekosistem karang, jenis ikan dan keanekaragaman hayati lainnya secara kasat mata dari permukaan.

c. Hutan Mangrove dan Ekosistem Pesisir. Di pantai Ulee Lheue tepatnya di Kuala Pantai Ulee Lheue, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh bersama aparat desa setempat sudah mulai menggalakkan penanaman hutan mangrove. Upaya tersebut dilakukan dengan dibantu oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemetaan terhadap hutan mangrove di kuala pantai Ulee Lheue sudah mulai diperhatikan. Hal ini merupakan langkah awal yang baik bagi kelestarian dan kesinambungan potensi ekonomi laut di kawasan tersebut. Pemerintah dan masyarakat sudah mulai sadar akan arti pentingnya kelestarian alam agar ekosistem laut dapat tetap terjaga dan terpelihara baik dari ulah tangan manusia maupun akibat dari abrasi laut itu sendiri. Selain itu ekosistem pesisir laut seperti phytoplankton, kepiting bakau, burung laut, ikan, karang, rumput laut dan banyak lainnya lagi sangat bergantung pada kelestarian alam yang dapat terjaga dengan adanya hutan mangrove.

d. Lingkungan laut bersih. Lingkungan laut yang bersih bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat, pengunjung dan para wisatawan juga ikut bertanggung jawab dengan kebersihan lingkungan laut dari pencemaran sampah yang tidak dapat didaur ulang. Selain limbah batu bara, sampah yang tidak dapat didaur ulang menjadi masalah yang serius terhadap keberlanjutan potensi ekonomi laut di Pantai Ulee Lheue. Para pengunjung lebih dituntut memiliki kesadaran untuk membawa pulang sampahnya sendiri atau setidaknya membuang sampah ditempat yang telah disediakan. Hal ini krusial mengingat lingkungan laut yang bersih menjadi salah satu daya tarik alami dan panorama alam yang indah untuk para pengunjung.

e. Tradisi Nelayan dan Kearifan Lokal. Lembaga Adat Laut Aceh, Hari Pantang Melaut dan Keramba Jaring Apung, dan Tarik Pukat merupakan kearifan lokal yang hanya terdapat di wilayah Aceh. Saat ini pemerintah telah melindungi Lembaga Adat Laut Aceh dan Hari Pantang Melaut beserta dengan segala aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga tersebut melalui Panglima Laot. Warisan budaya nenek moyang masyarakat Aceh yang tak ternilai harganya ini sudah mendapat pengakuan di Indonesia bahkan Dunia. Tradisi lain yaitu keramba jaring apung lepas pantai dan tarik pukat juga sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan pada pertengahan tahun 2022 lalu, Menparekraft RI datang ke Aceh dan ikut merasakan pelaksanaan tarik pukat yang dilakukan di sore hari menjelang waktu maghrib. Tarik pukat yang biasa dilakukan oleh kelompok nelayan di pesisir pantai masih dilakukan perseorangan atau kelompok masyarakat. Namun demikian, pemerintah belum sepenuhnya memberikan perhatian serius pada tradisi nelayan tersebut. Pelaksanaan masih belum teratur secara sistem dan administrasi yang baik dan yang seharusnya dapat mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan terhadap hal tersebut, agar menjadi salah satu budaya yang harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya serta berkesinambungan.
f. Keberlanjutan industri kelautan. Industri pengalengan ikan, *cold storage*, industri galangan kapal, pabrik es, dan industri pengolahan ikan merupakan hal yang dibutuhkan oleh Masyarakat Kota Banda Aceh untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan yang telah ada di Kota Banda Aceh. Dengan hasil kelautan dan perikanan yang melimpah, sangat disayangkan apabila industri yang tersebut diatas tidak dapat diusahakan dan diupayakan oleh Pemerintah. Hal ini mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah. Pada 2010, di Kota Banda Aceh pernah terdapat salah satu Perusahaan swasta yang bernama PT. Yakin Pasifik Tuna (YPT) yang bergerak di bidang pengolahan ikan, bahkan perusahaan tersebut dapat melakukan ekspor ikan tuna yang jumlahnya ber ton-ton. Namun demikian, saat ini perusahaan tersebut hanya tinggal nama, tentu saja ini tak lepas dari kurangnya perhatian

pemerintah daerah terhadap industri yang telah ada. Pengolahan ikan juga kembali ke sistem manual meskipun di zaman yang serba canggih seperti saat ini. Ikan kayu (keumamah), ikan kaleng, ekspor ikan, galangan kapal dan *cold storage* serta pabrik es adalah salah satu industri yang dapat dikembangkan demi mengoptimalisasikan potensi ekonomi kelautan yang terdapat di Kota Banda Aceh.

g. Kewirausahaan / UMKM. Saat ini pengolahan industri kelautan dan perikanan dijalankan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok kegiatan usaha perdagangan kelautan dan perikanan. Industri rumah tangga memegang peranan lebih banyak terhadap keberlanjutan industri kelautan dan perikanan. Para pelaku usaha UMKM lebih giat dan konsen dalam menaikkan nilai jual terhadap hasil kelautan dan perikanan. Para pelaku UMKM mengolah hasil kelautan dan perikanan menjadi produk yang lebih bernilai dan dapat dijual dipasaran bahkan hingga dibawa ke mancanegara. Beberapa diantaranya ialah: pengolahan ikan asin, pengolahan ikan kayu (keumamah), pengolahan gurita kering, pengolahan cumi kering, industri garam, pengolahan tiram, lobster, udang dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM agar mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan yang tersedia. Dalam hal ini, pendampingan, kebijakan dan sistem regulasi yang baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, agar apa yang telah diusahakan oleh kelompok masyarakat dapat lebih bernilai dalam mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan yang terdapat di Kota Banda Aceh.

Terdapat 3 (tiga) tantangan pemerintah pusat dan menjadi turunannya ke pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalisasi potensi ekonomi kelautan yang hingga saat ini belum terpecahkan yaitu;

a. Terbatasnya pendanaan APBN dalam mendukung *Blue Economy*. Untuk memenuhi pendanaan tujuh agenda pembangunan yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, dibutuhkan pendanaan sebesar USD 1.641,3 miliar. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu mendanai sekitar 20-25% dari kebutuhan tersebut, termasuk

kebutuhan sektor kemaritiman, perikanan dan kelautan. Sehingga sulit membebankan tanggung jawab untuk mengembangkan *blue economy* hanya dengan dana APBN.

b. Belum optimalnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dalam pengelolaan perikanan. Menyadari adanya tantangan terkait koordinasi lintas batas Provinsi, pemerintah meluncurkan sistem Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) pada tahun 2014. Setiap WPP mencakup beberapa pemerintah Provinsi, pemangku kepentingan dari sektor industri dan masyarakat. Kelompok-kelompok ini diwakili di oleh Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), yang bertanggung jawab untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan di WPP tersebut. Walaupun sistem ini dijadikan prioritas nasional, LPP belum memiliki anggaran operasional khusus dan seringkali kekurangan SDM, kantor, dan peralatan.

c. Infrastruktur yang belum memadai dan jumlah wisatawan yang meningkat menjadi ancaman bagi destinasi wisata laut dan pesisir. Dengan keterbatasan infrastruktur dasar dan layanan bagi masyarakat di sebagian wilayah Indonesia, berdampak terhadap destinasi wisata laut dan pesisir utama. Sebagai contoh, di kawasan pariwisata Pantai Ulee Lheue pada tahun 2015, sebelum ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas untuk pembangunan pariwisata, hanya 45% rumah tangga memiliki akses ke air ledeng, akses sanitasi sebanyak 48%, dan layanan pengumpulan sampah sebanyak 26%. Tekanan yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup diperparah dengan semakin meningkatnya kebutuhan wisatawan dan sektor bisnis [33].

Selain ketiga hal diatas, investasi sektor kelautan dan perikanan juga memiliki peran strategis yang sangat penting dalam formulasi optimalisasi potensi ekonomi kelautan di Kota Banda Aceh dan merupakan tantangan bagi pemerintah dalam rangka menguatkan potensi ekonomi kelautan. Terdapat 5 (lima) tahapan investasi sektor kelautan dan perikanan yang harus dikelola dengan baik agar bidang usaha kelautan dan perikanan ini dapat memberikan konstribusinya yaitu: jasa kelautan dan perikanan, penangkapan hasil kelautan dan perikanan, pemasaran hasil tangkapan kelautan dan perikanan, pengolahan hasil kelautan dan

perikanan, budidaya hasil kelautan dan perikanan. Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir investasi sektor kelautan dan perikanan berada di posisi terendah. Begitu juga dengan Kota Banda Aceh, ikut merasakan hal tersebut.

Salah satu strategi dalam mengoptimalkan nilai tambah ekonomi sumber daya kelautan dapat dilakukan melalui konsep *blue economy.* Pengembangan konsep *blue economy* sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Kerangka pembangunan *blue economy* merupakan penjabaran dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005-2025, khususnya mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kerangka pembangunan *blue economy* juga dicantumkan mulai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2005-2009 hingga RPJMN 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024 ditekankan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan [34].

Konsep *blue economy* berupaya mewujudkan keseimbangan antara aspek-aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekonomi dan ekologi. Dengan kata lain, *blue economy* tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menekankan kepada pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem kelautan. Selain untuk menjaga kesehatan laut, *blue economy* juga dapat membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena distribusi pertumbuhan ekonomi perikanan cenderung ke wilayah Indonesia bagian timur, sehingga juga meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), potensi blue *economy* diperkirakan mencapai USD 1,33 miliar dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja [35].

Kota Banda Aceh memiliki potensi ekonomi kelautan yang besar, untuk itu perlu dikembangkan dan didorong agar dapat menggerakkan roda perekonomian di Masyarakat. Pemerintah Aceh pernah melakukan kajian terhadap potensi sektor kelautan dan perikanan karena hal tersebut diatas. Dalam loka karya kajian tersebut mengundang banyak stakeholders mulai dari pemangku kebijakan, pelaku usaha, pihak akademisi, dan juga Lembaga

Swadaya Masyarakat. Pada lokakarya yang diadakan oleh Universitas Syiah Kuala tersebut, diskusi interaktif juga dilakukan dan mengulas hasil kajian yang ada. Mengutip dari pelaku usaha dari PT. Yakin Tuna Pacific (YTP), menyebutkan bahwa 70% produk perikanan Aceh keluar dari Aceh tanpa ada nilai tambah produk, dan masih menjual hasil tangkapan laut keluar dalam bentuk *frozen fish*. Besar harapan masyarakat bahwa, potensi perairan Aceh dapat dioptimalkan dan dinikmati oleh masyarakat Aceh. Oleh karena itu, perlu tata kelola yang lebih baik dalam menjalankan sistem dan didukung dengan regulasi serta kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengamankannya [36].

5. Strategi Optimalisasi Pengembangan Ekonomi Kelautan Kota Banda Aceh dalam Perspektif Manajemen

Merujuk pada paparan diatas terdapat beberapa potensi ekonomi kelautan yang harus dikembangkan yang terdiri dari wisata laut, ekosistem karang dan keanekaragaman hayati, hutan mangrove dan ekosistem pesisir, lingkungan laut bersih, tradisi nelayan dan kearifan lokal, industri kelautan, serta kewirausahaan. Seluruh sumber daya diatas merupakan modal besar yang dimiliki Kota Banda Aceh diharapkan dapat dioptimalkan secara maksimal agar dapat meningkatkan taraf hidup Masyarakat khususnya Masyarakat pesisir. Pemerintah Kota Banda Aceh harus memperhatikan potensi wisata unggulan yang didalamnya memiliki kekhasan daerah (budaya, ideologi agama/syari'ah) dan produk kreatif yang dihasilkan oleh Masyarakat sekitar. Desa Ulee Lheue saat ini telah memiliki Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang bernama BUM Desa Makmu Beusare dimana pada sektor industri mikro dan kecil hanya dua yang berjalan yaitu industri barang dari kain tenun dan industri makanan dan minuman (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak, susu). Sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, terdapat perikanan budidaya, perikanan tangkap, perikanan tambak garam, dan wisata Bahari. Desa Ulee Lheu juga telah masuk sebagai 50 desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 yang memiliki potensi wisata dan ekonomi kreatif yang mencakup wisata alam, budaya, dan wisata Sejarah. Pencapaian ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya

manusia dan beberapa pengembangan potensi yang telah dimiliki oleh desa Ulee Lheu.

Pada penelitian Konsep Blue Economy Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia [37] wisata pesisir dan Bahari menjadi sektor wisata yang paling cepat berkembang. Peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya alam penting untuk dilakukan seperti peningkatan Pembangunan hotel maupun resort, Pembangunan Pelabuhan dan perahu wisata, wisata air seperti *snorkeling* dan *diving* serta kegiatan lain yang dapat meningkatkan aktivitas wisata. Namun perlu diperhatikan bahwa ada beberapa kegiatan wisata seperti Pembangunan resort/vila maupun *underwater fishing* berkontribusi terhadap perubahan pesisir Pantai maupun polusi.

Secara khusus Organisasi Pariwisata Dunia, memaparkan tujuan wisata baik wisata Bahari maupun wisata laiinnya yaitu karena adanya, atraksi, personil, aksesibilitas, citra dan karakter, fasilitas umum dan swasta, serta harga. [38]

a. Atraksi yang dimaksud adalah wujud ketertarikan Masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata yang didalamnya termasuk Wisata Bahari, Wisata Kuliner, Wisata Religi dan Eco Wisata dan sebagainya;
b. Personil yang dimaksud adalah pemandu atau tenaga kerja yang terdidik untuk memudahkan interaksi pemahaman wisatawan terhadap kultur budaya lokal;
c. Aksesibilitas untuk memudahkan pengunjung menuju lokasi wisata, baik melalui darat, udara maupun laut;
d. Citra yang dimaksud adalah adanya ciri khas wisata yang dapat menjadi nilai khas lebih yang dapat meliputi pemandangan, keamanan, dan Tingkat pelayanan;
e. Fasilitas yang dimaksud adalah infrastruktur penunjang seperti akomodasi, jalan yang layak, rumah ibadah, fasilitas Kesehatan, maupun juga sentra kuliner yang layak;
f. Harga yaitu terkait dengan biaya akomodasi, transportasi, makan, dan lainnya yang merupakan aspek penting bagi pengunjung.

Strategi pengembangan potensi *blue economy* dalam kajian pengembangan *blue economy* Masyarakat pesisir [39] meliputi:

a. Penyatuan konsep *blue economy* dengan digitalisasi industri akuakultur yang dapat mendorong kemandirian dan pemberdayaan Masyarakat secara menyeluruh.
b. Penguatan ekonomi Masyarakat dengan mendorong tumbuhnya industry maritim dimana industri maritim merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan dengan harapan dapat memunculkan para investor baru dalam pertumbuhan ekonomin nasional
c. Merangkul pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang membudidayakan hasil tangkapan seperti udang, ikan, dan lainnya melalui inovasi produk kreatif yang memiliki daya saing dan kualitas yang cukup baik dimana implikasinya adalah pemberdayaan Masyarakat di wilayah pesisir.

Strtategi pengembangan lainnya dilakukan dengan dengan beberapa cara, yang pertama *minimize waste* secara menyeluruh seperti menjaga ekosistem karang dan keanekaragaman hayati, hutan mangrove dari limbah – limbah; kedua inklusi sosial dengan memberikan pelatihan – pelatihan bagi masayarakat sekitar guna meningkatkan keterampilan dan pendapatan nelayan; dan melakukan inovasi seperti pengelolaan limbah menjadi produk kreatif sebagai alternatif mata pencaharian dan peningkatan ekonomi rumah tangga seperti membuat kerajinan tangan dari limbah kulit kerrang maupun produk olahan ikan.[40][41]

Kajian lainnya yang dilakukan oleh Iverson dan Dervan pengembangan *blue economy* dapat melalui beberapa cara [42], antara lain:

a. Pengembangan dan Penguatan Lembaga atau Usaha Lokal
   Pengembangan lembaga lokal merupakan suatu upaya yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat:

   1) Membentuk kelompok sesuai dengan potensi sumber daya yang ada, guna menumbuhkan rasa saling memiliki dan tanggung jawab sehingga pada akhirnya terbentuk kelompok yang solid dalam menghadapi kelompok pengguna.

2) Kelompok diarahkan untuk menggali kembali potensi bidang masing-masing sehingga dapat mewujudkan kelompok yang memiliki kemandirian khususnya di bidang permodalan dan juga pemasaran, dimana akhirnya terbentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
3) Mengembangkan produk turunan yang dapat meningkatkan hasil sumber daya yang ada, sehingga menjadi kelompok yang cakap dalam membangun dan mengembangkan *added value* suatu produk.
4) Memfasilitasi jalur distribusi produk usaha yang ada berikut dengan produk turunannya.
5) Memfasilitasi perluasan jaringan pengolahan produk dari hulu ke hilir.
6) Melakukan strategi positioning yang tepat bagi produk sehingga mampu berdaya saing.

b. Pengembangan Manajemen Usaha

Pengembangan Manajemen usaha pada lingkup kewirausahaan perikanan ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah maupun kelompok usaha. Pertama, proses bisnis pada industri perikanan yang harus memperhatikan faktor input yang diantaranya adalah penyediaan pupuk, benih, pakan dan obat (terutama penunjang produksi budidaya perikanan), alat tangkap dan perahu atau kapal serta mesin, dan transportasi. Kedua, adalah bisnis produksi yaitu produksi budidaya perikanan penangkapan ikan dengan nilai tambah yang cenderung relatif kecil. Ketiga, bisnis pengolahan hasil perikanan, dimana diharapkan adanya peningkatan nilai tambah (*added value*) melalui proses seleksi, penanganan, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan. Bisnis pengolahan hasil perikanan dapat dilakukan dengan teknologi pengasapan, pendinginan, penggaraman, fermentasi, surimi maupun pengalengan. Keempat, bisnis perdagangan hasil perikanan yang dapat dilakukan melalui proses *intermediary* atau perantara antara produsen dan konsumen. Produknya dapat berupa ikan segar maupun ikan olahan. Dalam pemasaran hasil perikanan diantaranya terjadi proses promosi, distribusi dan penjualan. Pada prinsipnya, dalam pengolahan

dan perdagangan perikanan diupayakan adanya peningkatan nilai tambah atau *added value*. Nilai tambah dapat diupayakan melalui nilai waktu, nilai tempat maupun nilai perubahan bentuk dan fungsi. [43].

c. Pengembangan wisata laut, ekosistem karang dan keanekaragaman hayati, hutan mangrove dan ekosistem pesisir, lingkungan laut bersih, tradisi nelayan dan kearifan lokal di Kota Banda Aceh harus mencakup beberapa komponen antara lain: 1. Memiliki daya tarik yang mencakup sumberdaya alam, budaya maupun event yang mampu menarik minat khusus Masyarakat sekitar.; 2. Aksesibilitas, dukungan moda transportasi baik dari darat maupun air untuk mendukung akses Masyarakat. Bus Trans Kutaraja telah menjadi moda yang disediakan pemerintah dan dapat dimanfaatkan langsung oleh Masyarakat, namun untuk moda transportasi wisata air belum ada yang dapat dinikmati secara langsung dan gratis karena masih menggunakan perahu milik Masyarakat pribadi. ; 3. Amenitas, Dimana fasilitas yang dibutuhkan telah tersedia seperti pusat informasi wisata, jenis layanan wisata, biro perjalanan, toko cinderamat, layanan jaringan komunikasi dan internet, air bersih dan sebagainya.. ; 4. Fasilitas Pendukung seperti rumah sakit, bank maupun tempat ibadah [44].

Riset tentang pengembangan *blue economy* di negara Maroko adalah peningkatan pemahaman tentang laut dan kemajuan teknologi sangat penting untuk mewujudkan potensi ekonomi secara berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi adalah Maroko sangat tertinggal dalam hal pengetahuan mengenai ekosistem pesisir dan laut dan sangat kekurangan sumber daya manusia dan material, kemudian masalah lingkungan hidup dimana Maroko berada di peringkat ke-164 dalam Indeks Kinerja Lingkungan untuk tahun 2022 dan peringkat ke-164 dalam indikator vitalitas ekosistem, peringkat ke-123 dalam bidang kesehatan dan lingkungan, serta peringkat ke-135 dalam kebijakan iklim. Angka-angka ini menunjukkan bahwa diperlukan lebih banyak upaya untuk mengembangkan ekonomi biru di Maroko. Inovasi dapat membantu mendorong *blue economy* menuju pertumbuhan sekaligus memastikan perlindungan lingkungan laut. *Blue Economy*

mendorong inovasi dalam teknologi, proses, dan model bisnis. Inovasi diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan antara lain ketahanan pangan, ketersediaan air, ketahanan energi, perubahan iklim dan kesehatan. Inovasi mencakup promosi ekowisata, pembuatan kapal berbasis daur ulang, energi terbarukan yang bersih, dan lain lain. [45]

Penelitian yang dilakukan di negara – negara kawasan Eropa pentinganya Pembangunan keuangan dalam meingingkatkan keberlanjutan *blue economy* dimana Pembangunan keuangan jangka Panjang sangat mempengaruhi perekonomian dalam memberikan implikasi kebijakan yang penting untuk mendorong *blue economy*. Agar suatu negara berhasil dalam ekonomi biru, negara tersebut harus memiliki tata kelola yang baik, visi yang jelas, teknologi mutakhir, pemantauan yang terkoordinasi, sistem manajemen, dan reformasi dalam institusi dan peraturannya. Prinsip Manajemen Pembiayaan untuk blue economy berkelanjutan [46]:

a. Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin pelestarian, perbaikan, dan pemeliharaan jasa ekosistem yang disediakan oleh ekosistem maritim.
b. Adaptasi terhadap persyaratan legislatif untuk pembangunan berkelanjutan dan kesehatan laut di tingkat global, regional, dan nasional.
c. Pengamatan berbasis ilmiah mengenai bahaya dan potensi dampak negatif (satu kali dan kumulatif) terhadap lingkungan dan masyarakat yang terkait dengan kegiatan yang didanai.
d. Keterlibatan yang berarti dengan pemangku kepentingan, serta partisipasi dan dukungan terhadap masyarakat daerah.
e. Kerja sama antar investor dalam hal pertukaran informasi, praktik terbaik, dan pembelajaran yang diperoleh.
f. Pengungkapan fakta mengenai investasi secara terbuka, transparan, dan jujur, termasuk dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan perekonomian.
g. Transisi yang lebih cepat menuju ekonomi biru memerlukan kolaborasi antara sektor publik, komersial, dan nirlaba.
h. Mempromosikan pertukaran pengetahuan ilmiah dan statistic mengenai lingkungan laut serta pengembangan

pengetahuan dan pengumpulan data mengenai dampak buruk dan konsekuensi yang terkait dengan investasi.

i. Atur proyek dan kegiatan ke dalam kategori prioritas yang akan membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
j. Bantuan inisiatif untuk program yang mempunyai dampak positif jangka pendek dan jangka panjang terhadap masyarakat, perekonomian, dan lingkungan.
k. Penting untuk menggunakan berbagai alat keuangan untuk mendanai proyek pembangunan berkelanjutan skala lokal dan besar untuk meningkatkan kesehatan ekosistem laut, dukung investasi yang mengarah pada solusi komersial yang kreatif.

Di Kuwait,terdapat beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan *blue economy* yang diantaranya adalah kurangnya komitmen pemerintah dan arah kebijakan, diversifikasi ekonomi dan ketergantungan pada minyak, masalah lingkungan dan ekologi, kurangnya Pembangunan tekonomogi dan infrastruktur dan juga pada penerimaan sosial dan budaya. Strategi yang dilakukan adalah dengan memperkuat kerangka tata Kelola dan kebijakan, meningkatkan ketahanan ekonomi melalui diversifikasi yaitu investasi strategis, mendorong kelestarian lingkungan hidup dengan melindungi ekosistem laut jangka Panjang, berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur dan yang terakhis integrasi budaya. [47]

Hasil kajian terhadap implementasi manajemen terhadap ekonomi kelautan berdasarkan beberapa kajian penelitian diatas, maka ada beberapa strategi manajemen untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah:

a. Manajemen Sumber Daya Manusia
   1) Memberikan pelatihan – pelatihan bagi tenaga kerja terdidik untuk meningkatkan potensi wisata di kota Banda Aceh agar dapat memberikan layanan positif terhadap pendatang guna lebih memahami budaya lokal;
   2) Memberikan pelatihan – pelatihan pengelolaan dan pengembangan manajemen usaha yang baik bagi BUMG yang berada di wilayah Ulee Lheu Kota Banda Aceh guna

dapat mengelola potensi sumber daya alam (khususnya sumber daya kelautan);

3) Menggiatkan dan Mengoptimalkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang diwakili oleh Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP) dengan merekrut dan beranggotakan Masyarakat sekitar yang diberikan pengetahuan dalam bentuk pelatihan terstruktur dan sistematis tentang Potensi Ekonomi Kelautan, memberikan wadah, tempat dan peralatan yang diperlukan. Sumber Dana dapat diambil dari Dana Gampong yang dikucurkan oleh pemerintah.
4) Pengembangan dan Penguatan Lembaga Lokal;

b. Manajemen Pemasaran
   1) Pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat harus memperhatikan potensi wisata unggulan (*added value*) yang didalamnya memiliki kekhasan daerah (budaya, ideologi agama/syari'ah) dengan menciptakan citra kota Banda Aceh sebagai kota wisata syari'ah;
   2) Pemerintah Kota Banda Aceh mengupayakan aksesibilitas yang cukup baik untuk pendatang dengan menetapkan harga yang sesuai baik dari segi akomodasi, transportasi, maupun layanan public;
   3) Pemerintah Kota Banda Aceh merangkul pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) melalui inovasi produk kreatif dalam teknologi model bisnis yang memiliki daya saing dan kualitas yang cukup baik dimana implikasinya adalah pemberdayaan Masyarakat di wilayah pesisir dan juga sebagai alternatif pendapatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
   4) Melakukan promosi ekowisata, dan lain lain;
   5) Pemerintah Kota Banda Aceh mulai menggunakan digitalisasi teknologi guna mendukung penguatan ekonomi kelautan di Kota Banda Aceh.

c. Manajemen Keuangan
   1) Adaptasi terhadap persyaratan legislatif untuk pembangunan berkelanjutan dan kesehatan laut di tingkat global, regional, dan nasional;

2) Keterlibatan yang berarti dengan pemangku kepentingan, serta partisipasi dan dukungan terhadap masyarakat daerah;
3) Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan Kerjasama dengan investor baik dari sektor publik, komersial, maupun nirlaba;
4) Mempelajari dan bertukar informasi mengenai dampak buruk dan konsekuensi yang terkait dengan investasi;
5) Mengkatagorikan prioritas yang akan membantu mencapai potensi ekonomi kelautan Kota Banda Aceh;
6) Memberikan anggaran untuk program masyarakat yang mempunyai dampak positif jangka pendek dan jangka panjang terhadap masyarakat, perekonomian, dan lingkungan Kota Banda Aceh;
7) Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pengamatan berbasis ilmiah mengenai bahaya dan potensi dampak negatif (satu kali dan kumulatif) terhadap lingkungan dan masyarakat yang terkait dengan kegiatan yang didanai; dan
8) Menyusun rencana strategis melalui *blue finance* dimana Pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan memiliki peran penting menarik partisipasi swasta untuk mendukung program ekowisata.

d. Manajemen Infrastruktur
1) Membangun infrastruktur yang efisien;
2) Memfasilitasi dengan infrastruktur yang lebih memadai untuk destinasi wisata laut;
3) Menciptakan kebijakan fasilitas insfrastruktur yang dapat mengekspresikan nilai jual wisata laut; dan
4) Melakukan pendekatan fasilitas yang terintegrasi dalam mengoperasikan, memelihara, meningkatkan dan mengadaptasi infrastruktur guna terciptanya suatu lingkungan yang baik.

Untuk pengembangan ekonomi kelautan di kota Banda Aceh, sangat diperlukannya komitmen pemerintah pusat dan dan pemerintah kota Banda Aceh, baik dari segi kebijakan maupun implementasi kebijakan yang diikuti dengan sistem dan regulasi yang terstruktur. Pemerintah Kota Banda Aceh juga menerapkan Strategi dengan memperkuat kerangka tata Kelola dan kebijakan,

melakukan investasi strategis, mendorong kelestarian lingkungan hidup dengan melindungi ekosistem laut jangka Panjang, berinvestasi dalam teknologi dan peningkatan infrastruktur.

STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI *BLUE ECONOMY* KOTA BANDA ACEH DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK

1. Urgensi Intervensi Kebijakan Publik Berkualitas dalam Optimalisasi *Blue Economy* Berkelanjutan

Ekonomi kelautan (*blue economy*) yang berkelanjutan akan memberikan banyak manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatnya populasi manusia dan meningkatnya permintaan akan sumber daya, lautan, pesisir, dan perairan pedalaman kita yang terkoneksi menghadapi potensi krisis 3 (tiga) entitas yaitu: perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ketiganya saling berhubungan erat dan dapat mengancam kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan. Oleh karena itu, pelbagai negara baik di Eropa, Amerika, maupun Asia semakin berupaya mengembangkan ekonomi kelautan mereka, sambil

mengatasi krisis ini dan memenuhi target-target yang saling terkait seperti: *Sustainable Development Goals* (SDG's), *Global Biodiversity Framework*, dan *Paris Agreement*.

Dengan perkiraan nilai ekonomi tahunan sebesar US$2,5 triliun, ekonomi kelautan (*blue economy*) setara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia [48], ekonomi kelautan yang berkelanjutan memiliki potensi untuk mengatasi diskoherensi dalam pengelolaan ekosistem laut, pantai, dan air tawar saat ini dan menjadi komponen fundamental dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologi bumi. Ekonomi kelautan yang berkelanjutan memberikan manfaat penting bagi generasi sekarang dan mendatang [49, 50], memulihkan, melindungi dan memelihara ekosistem yang beragam, produktif dan berketahanan, dan didasarkan pada *clean technology*, energi terbarukan, dan aliran material melingkar. Laut yang sehat adalah kunci masa depan berkelanjutan bagi manusia dan bumi.

Memanfaatkan sumber daya ekosistem laut dan pesisir dapat memenuhi kebutuhan ini, namun perlu dilakukan dengan cara yang berkelanjutan. Pertumbuhan pesat yang tidak berkelanjutan di sektor-sektor kelautan menyebabkan risiko kerusakan lingkungan hidup, mengikis sumber daya laut, dan menciptakan risiko gagalnya kebijakan, pasar, dan menurunnya reputasi dunia usaha, lembaga keuangan, dan *stakeholder* lainnya [51–53]. Negara-negara berkembang dan negara-negara berkembang kepulauan kecil menghadapi tantangan-tantangan unik yang signifikan, karena banyak negara yang sangat bergantung pada sumber daya berbasis laut dan sangat rentan terhadap dampak degradasi laut dan pesisir serta perubahan iklim.

Meningkatkan akses mereka terhadap ilmu pengetahuan, rekomendasi kebijakan strategis, dan pendanaan akan memungkinkan mereka memanfaatkan peluang ekonomi kelautan yang lebih berkelanjutan, termasuk lapangan kerja yang lebih layak, energi yang lebih bersih, peningkatan ketahanan pangan, sekaligus berkontribusi terhadap perlindungan laut, pantai dan perairan pedalaman [54, 55]. Membangun ekonomi kelautan yang inklusif berbasis pelestarian lingkungan adalah fokus mendasar dari ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Mendukung koherensi kebijakan sosial yang inklusif, serta pendekatan perencanaan dan

pengelolaan laut berbasis analisa lingkungan yang mendalam merupakan cara penting untuk membangun ketahanan ini.

Terdapat peluang besar untuk beralih ke pendekatan yang lebih sirkular dan membantu mencapai hasil pembangunan ekonomi kelautan yang inklusif, sekaligus memastikan upaya perlindungan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Salah satunya ialah dengan dihasilkannya kebijakan kelautan/ kemaritiman yang deliberatif dan berkualitas, yang diikuti dengan pemantauan implementasi dan penilaian evaluasi kebijakan yang obyektif. Hal tersebut sangat esensial mengingat keberhasilan pembangunan di suatu negara (baik pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain-lain) amat ditentukan oleh kesuksesan menghasilkan kebijakan publik (*public policy*) yang berkualitas [56–59] dan obyektivitas dalam pemantauan implementasi serta penilaian hasil evaluasinya.

Kebijakan publik (termasuk pada aspek ekonomi kelautan/*blue economy*) dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah, dimana aktor dan faktor non-pemerintah tentu saja dapat mempengaruhi pengembangan kebijakan publik. Kebijakan publik (*public policy*) memiliki tahapan-tahapan yang meliputi: perumusan masalah (*problem formulation*), penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), penetapan kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Dalam mengoptimalisasi pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, salah satu prasyarat yang diperlukan ialah kualitas dari setiap tahapan kebijakan publik tersebut. Kualitas dimaksud ialah kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*), analisis kebijakan yang dilakukan secara obyektif dan *prudent*, serta berpegang pada kaidah saintifik dan nilai-nilai kebenaran.

2. Kerangka Kebijakan *Blue Economy*: Obyektif pada Tataran Internasional dan Nasional

Kembali pada konteks urgensi intervensi kebijakan publik dalam rangka mengoptimalisasi pembangunan ekonomi kelautan, perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan konsensus global, terutama yang termaktub dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's), khususnya tujuan kebijakan SDG's ke-

14 yakni: “*Kehidupan di bawah air: Melestarikan dan memanfaat-kan samudra, lautan, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan*”. Lebih lanjut, kebijakan SDG’s ke-14 tersebut memuat 10 sub-tujuan yaitu [60]:

a. Mengurangi Polusi Laut. Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi laut, khususnya dari aktivitas di darat, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.
b. Melindungi dan Memulihkan Ekosistem. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan mengambil tindakan restorasi guna mencapai lautan yang sehat dan produktif.
c. Mengurangi Asamifikasi Laut. Meminimalkan dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui peningkatan kerja sama ilmiah di semua tingkatan.
d. Perikanan Berkelanjutan. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan mengakhiri penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur serta praktik penangkapan ikan yang merusak dan menerapkan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan stok ikan dalam waktu sesingkat mungkin, setidaknya ke tingkat yang dapat menghasilkan hasil maksimal yang berkelanjutan sebagaimana ditentukan oleh karakteristik biologisnya.
e. Melestarikan Wilayah Pesisir dan Laut. Pada tahun 2020, konservasi setidaknya 10% wilayah pesisir dan laut, sesuai dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.
f. Mengakhiri Subsidi yang Berkontribusi Terhadap Penangkapan Ikan Berlebihan. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih, menghapuskan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, dan menahan diri untuk tidak memperkenalkan subsidi baru, dengan mengakui adanya perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk

negara-negara berkembang dan kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*).

g. Meningkatkan Manfaat Ekonomi dari Penggunaan Sumber Daya Laut yang Berkelanjutan. Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara-negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara kurang berkembang dari pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budi daya perairan, dan pariwisata yang berkelanjutan.
h. Meningkatkan Pengetahuan Ilmiah, Penelitian dan Teknologi untuk Kesehatan Laut. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan transfer teknologi kelautan, dengan memperhatikan kriteria dan pedoman transfer teknologi kelautan antar-pemerintah, dalam rangka meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut terhadap pembangunan negara berkembang, khususnya negara-negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara kurang berkembang.
i. Dukungan Nelayan Skala Kecil. Memberikan akses bagi nelayan kecil terhadap sumber daya kelautan dan pasar.
j. Menerapkan dan Menegakkan Hukum Laut Internasional. Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, yang memberikan kerangka hukum untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 158 ("*the future we want*").

Mengacu pada konsensus kebijakan ekonomi kelautan pada tataran global tersebut, dalam tataran nasional, pemerintah Indonesia meresponnya dengan menetapkan kebijakan ekonomi kelautan (*blue economy*) yang termaktub dalam 3 (tiga) dokumen kebijakan. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 [61]. Dalam dokumen tersebut, untuk mewujudkan visi pembangunan nasional 2005-2025, salah satunya ditempuh melalui misi pembangunan nasional yaitu: "*mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan*

berbasiskan kepentingan nasional". Secara lebih rinci, misi tersebut terdiri dari:

a. Menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan Pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan.
b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran.
c. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Kedua, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 [62]. Kebijakan yang tertuang dalam RPJMN ini merupakan turunan/pengejawantahan dari RPJPN di atas. Dalam dokumen RPJMN tersebut, pembangunan ekonomi pada kurun waktu 2020-2024 akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Obyektif tersebut dicapai salah satunya melalui: "*pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan*". Bahkan, peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan masuk ke dalam salah satu sasaran prioritas nasional.

Ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia [63]. Perpres tersebut semakin meneguhkan *political will* pemerintah terhadap ekonomi kelautan, karena menjadi pedoman bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. Selain itu, Perpres tersebut juga menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia [64].

3. *Best Practice* Keberhasilan Kebijakan *Blue Economy* pada Beberapa Negara: *Lessons Learned* bagi Indonesia

Australia meluncurkan proyek priortas nasional yang dikenal dengan *Blue Well-being Initiative* sebagai bentuk konkret internalisasi kebijakan ekonomi kelautan [65]. Australia mengakui bahwa pembangunan dan pertumbuhan industri berbasis laut, atau *blue GDP* (PDB biru) mempunyai potensi besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial Australia. Lain halnya dengan beberapa negara di Asia Selatan seperti: India, Bangladesh, dan Sri Lanka yang memfokuskan kebijakan pembangunan ekonomi kelautan pada aspek transportasi laut dan pelayaran internasional [66]. Hasilnya, 3 negara tersebut berhasil mendongkrak produk domestik bruto secara signifikan, karena negara-negara kawasan Asia Selatan lainnya dan negara sekitar kawasan tersebut banyak menggunakan jasa transportasi laut dan pelayaran internasional dari India, Bangladesh, dan Sri Lanka. Keberhasilan ketiga negara tersebut turut dipengaruhi oleh kesadaran bahwa pengiriman transportasi laut merupakan moda transportasi global termurah, yang membawa 80% volume perdagangan barang dagangan global, dan mengangkut sekitar 10 miliar ton barang, sehingga memiliki peluang ekonomi yang sangat besar.

Di sisi lain, hasil riset Zhao, Hynes, dan He menemukan bahwa di China, kebijakan ekonomi kelautan menjadi salah satu prioritas nasional karena dipandang sebagai salah satu determinan pembangunan ekonomi. Industri kelautan utama China menghasilkan nilai tambah *output* sebesar US$239,09 miliar dan menyumbang 4,03% PDB nasional China. Industri kelautan besar diketahui mempekerjakan 9.253.000 orang [67]. Analisis riset tersebut juga menemukan bahwa pariwisata pesisir, industri komunikasi dan transportasi kelautan, serta industri perikanan laut mendominasi perekonomian kelautan China. Lebih lanjut, hasil analisis rangkaian waktu selama kurun 10 tahun menemukan bahwa perekonomian kelautan China mengikuti jalur pertumbuhan yang sangat mirip dengan perekonomian nasional. Adapun berdasarkan pengalaman Amerika Serikat, kebijakan ekonomi kelautan ditujukan untuk menjaga kesehatan laut dan mendukung masyarakat pesisir dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim. Bahkan, *blueprint* ekonomi kelautan telah muncul

sebagai salah satu proposal kebijakan kandidat Presiden dari Partai Demokrat Elizabeth Warren pada tahun 2020. Ekonomi kelautan dikampanyekan dapat meningkatkan ketahanan sosial ekonomi, keadilan lingkungan, dan mengatasi kesenjangan sosial [68].

Inovasi ekonomi kelautan mencakup banyak sektor dan memperoleh nilai utamanya dari teknologi digital, ketersediaan talenta terbaik, modal awal dan pertumbuhan, modal intelektual, kreativitas, dan ekosistem kuat yang dapat menghubungkan perusahaan rintisan dengan program dan dana untuk ekspansi. Di Kanada, inisiatif kebijakan ekonomi kelautan salah satunya dipengaruhi oleh potensi sumber daya alamnya, dimana terdapat lautan yang membentang di pantai barat, utara, dan timur [69]. Dengan sumber daya laut yang melimpah dan kemampuan pengelolaan yang mumpuni, Kanada menjadi pemimpin global dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi pesisir dan kelautan. Hal ini kemudian semakin memberikan peluang yang sangat besar, baik secara komersial maupun dalam hal kemampuannya untuk mempengaruhi ekonomi politik global. Pembangunan ekonomi kelautan di Kanada secara kontinyu dilakukan dengan basis inovasi-inovasi yang menyatukan sektor industri, akademisi, investor, pemerintah, dan pemangku kepentingan masyarakat lainnya. Model ini didasari pada kultur kolaborasi Kanada, yang bertumpu pada kemitraan swasta-publik (*public private partnership*) yang kuat.

Di bidang teknologi energi terbarukan lepas pantai, penangkapan dan penyimpanan karbon, dan minyak dan gas, kebijakan pembangunan ekonomi kelautan di Inggris (melalui cabang teknologinya NSRI/*the National Sea Rescue Institute*) dilakukan dengan berkolaborasi dengan *Scottish Enterprise* dan *Nippon Foundation* Jepang melalui investasi sebanyak £20,9 juta ke dalam 6 (enam) proyek penelitian dan pengembangan ekonomi kelautan yang sedang dikembangkan oleh 20 perusahaan dari Skotlandia dan Jepang [70]. Dalam 6 (enam) proyek tersebut, kolaborasi akan dilakukan untuk mengembangkan inovasi dalam tambatan, sistem instalasi, geosains, dan kecerdasan buatan. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan mengingat menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD)

ekonomi kelautan menyumbang 2,5% PDB global, yang pada tahun 2030 diproyeksikan meningkat dua kali lipat menjadi sekitar US$ 3 triliun. Oleh karena itu, inovasi dalam teknologi dan proses bisnis akan menjadi tema dan proyek sangat penting.

Sementara itu, *European Union* (EU) mengemukakan konsep kebijakan "*blue growth*" (pertumbuhan biru) pada tahun 2012 [71]. Berfokus pada revitalisasi perekonomian, kebijakan ekonomi kelautan di negara-negara EU secara kontinyu berhasil mengembangkan kegiatan industri kelautan yang meliputi: konstruksi, transportasi, pengembangan sumber daya mineral, pembangunan kapal, pemasangan kabel komunikasi, perusahaan farmasi, energi berkelanjutan dari gelombang, wisata rekreasi tepi laut, serta perikanan dan budidaya perairan. Pada tahun 2017, EU mengeluarkan laporan tentang strategi *blue growth* menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan pekerjaan dalam ekosistem ekonomi kelautan. Laporan ini mengkaji apa yang telah dipelajari dan apa yang telah dicapai sejak tahun 2012, apa yang sedang berjalan dan apa yang masih belum ada. 5 (lima) aspek dijelaskan dalam laporan ini: 1) Mendorong pertumbuhan di lima bidang fokus, termasuk energi biru, akuakultur, pariwisata pesisir dan maritim, bioteknologi biru, sumber daya mineral dasar laut; 2) Manfaat data kelautan, perencanaan tata ruang dan pengawasan maritim untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi biru; 3) Mendorong pendekatan kemitraan; 4) Meningkatkan investasi; dan 5) Menjadikan strategi pertumbuhan biru sesuai dengan tantangan masa depan.

Di Indonesia sendiri, sebagai negara kepulauan yang lebih dari 70% wilayahnya berupa lautan, mempunyai potensi ekonomi kelautan yang sangat besar. Menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, berdasarkan hasil pemetaan dan informasi geospasial yang dilakukan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, luas wilayah perairan Indonesia berkisar 6,4 juta km^2 dari total 8,3 juta km^2 luas daratan dan perairan Indonesia [72]. Potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan mencapai US$1,33 triliun per tahun (lebih besar dari Produk Domestik Bruto Nasional (PDB) tahun 2022 yaitu US$1,31 triliun [73]. Sektor kelautan dan perikanan juga menyumbang volume produksi perikanan nasional

hingga 23.186.442 ton dengan nilai produksi sekitar Rp. 384,48 miliar. Lebih lanjut, nilai ekspor produk perikanan Indonesia juga cukup besar, yakni mencapai 1.078,11 ribu ton dengan nilai US$ 4,52 miliar [74].

Dengan potensi ekonomi kelautan yang sangat besar tersebut, dan didukung oleh kerangka kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, Indonesia semestinya bisa menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi kelautan (*blue economy*) di kancah internasional (atau setidaknya di kawasan ASEAN). Namun demikian, fakta empirik menunjukkan meskipun dari sisi potensi ekonomi, dan dari sisi ketersediaan produk kebijakan ekonomi kelautan (*blue economy*) pemerintah Indonesia sudah mencoba mengakomodir, tetapi potensi-potensi tersebut belum dapat sepenuhnya dioptimalkan, utilitas dari produk-produk kebijakan yang dimiliki juga belum begitu berdampak signifikan.

Hal tersebut tercermin setidaknya dari 2 hal: *Pertama*, hasil pengukuran *Blue Economy Development Index*/BEDI (Indeks Pembangunan Ekonomi Biru) yang dirilis pada tahun 2020 oleh *Archipelagic and Islands States*/AIS Forum (Forum Negara-negara Pulau dan Kepulauan), dimana posisi Indonesia hanya berada pada peringkat ke-36 dari 47 negara dengan skor 4,3 [75]. Belum optimalnya capaian peringkat tersebut ditengarai oleh adanya 2 (dua) dari 8 (delapan) indikator BEDI Indonesia yang memperoleh nilai rendah sehingga perlu perbaikan serius. Indikator pertama yaitu *Inclusive Development Index* (Indeks Pembangunan Inklusif), dimana Indonesia hanya memperoleh nilai 0,25.

Hal ini menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut di Indonesia belum sepenuhnya terdistribusi merata, baik secara etnis, *gender*, maupun antar-generasi. Indikator kedua terkait *Governance Index* (Indeks Tata Kelola) meliputi pengukuran sejumlah aspek penting terkait kebijakan dan kapasitas kelembagaan, lingkungan usaha, kualitas air, energi, pelayaran, dan sumber daya alam. Pada indikator ini Indonesia memperoleh skor 0,3 atau berpotensi mengalami masalah lingkungan dengan derajat tinggi, termasuk akibat dari tingginya pembuangan sampah plastik di laut [76].

Kedua, hasil pengukuran *Ocean Health Index* (OHI) tahun 2023, dimana dari 10 dimensi yang diukur yakni: peluang penangkapan ikan artisanal, keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, perairan bersih, mata pencaharian dan perekonomian pesisir, perlindungan pesisir, penyediaan makanan, produk alami, kenyamanan tempat, pariwisata dan rekreasi [77] (dimensi dimaksud tertera pada gambar di bawah ini), skor Indonesia hanya 69 poin dari total skor maksimal 100 poin.

Gambar 4.1. Dimensi-dimensi Pengukur *Ocean Health Index*
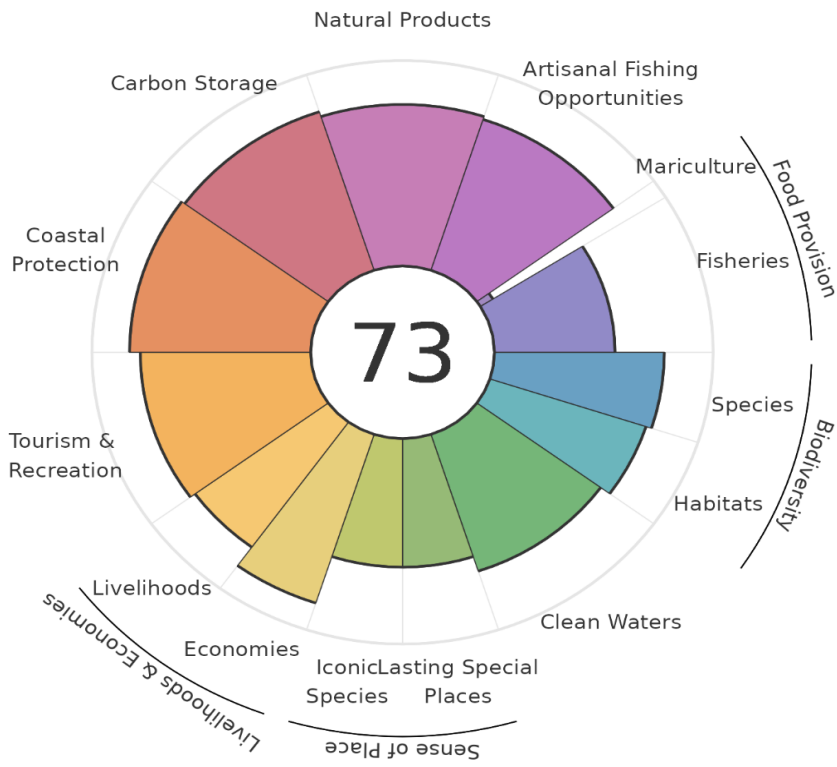
Sumber: Ocean Health Index (2024)

Skor tersebut membuat posisi Indonesia hanya berada di peringkat ke-152 dari total 220 negara yang diukur. Peringkat tersebut masih tertinggal dibanding negara tetangga seperti Singapura (101), Myanmar (92), dan negara-negara berkembang lainnya seperti: Argentina (103), Mesir (133), dan Brazil (22). Hasil pengukuran *Blue Economy Development Index* (BEDI) dan *Ocean*

Health Index (OHI) tersebut mengindikasikan bahwa perumusan kebijakan publik sampai dengan evaluasi kebijakan publik di bidang ekonomi kelautan (*blue economy*) di Indonesia belum sepenuhnya optimal, dan potensi-potensi strategis ekonomi kelautan yang dimiliki Indonesia belum sepenuhnya dimaksimalkan.

Oleh karena itu, diperlukan kerangka kebijakan yang lebih utilitatif, yang didukung oleh kualitas dalam setiap tahapan kebijakan publik (khususnya dalam aspek kebijakan ekonomi kelautan). Selain itu, praktik-praktik baik dari negara-negara lain di atas yang telah berhasil mengoptimalisasi kebijakan pembangunan ekonomi kelautan dapat menjadi salah satu referensi pembelajaran yang patut dieksplorasi/diadopsi oleh Indonesia (secara luas), maupun (secara spesifik) di daerah-daerah yang memiliki potensi strategis ekonomi kelautan. Hal-hal tersebut perlu diwujudkan agar seluruh potensi ekonomi kelautan yang dimiliki Indonesia bisa diberdayakan dengan baik, dan seluruh daerah di Indonesia (termasuk Kota Banda Aceh) yang memiliki sumber daya laut potensial dapat lebih didorong untuk turut berkontribusi sehingga utilitas ekonomi kelautan dapat lebih dirasakan secara luas.

4. Kerangka Kerja Optimalisasi Potensi *Blue Economy* Kota Banda Aceh dari Perspektif Kebijakan Publik

Bagi negara dengan potensi sumber daya laut luar biasa seperti Indonesia, pembangunan ekonomi kelautan (*blue economy*) harus didorong secara imperatif di seluruh wilayah dengan tipologi natural sebagai daerah bahari/pesisir yang (jika merujuk ke Bab 2 buku ini) memiliki begitu banyak potensi bahari yang bisa menjadikan Kota Banda Aceh sebagai daerah yang dapat mengoptimalisasi potensi untuk kesejahteraan bersama, ketahanan pangan, lapangan kerja lokal, peningkatan kapasitas, kesetaraan gender, dan manfaat ekonomi tinggi dari sumber daya kelautan. Berdasarkan kajian yang dilakukan, sampai dengan saat ini Aceh sendiri baru memiliki produk kebijakan yang mengatur mengenai perikanan yang tertuang di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan [78].

Asas dari produk kebijakan tersebut ialah agar "*pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas keislaman, pemanfaatan, kekeluargaan, keadilan, kemitraan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian ekosistem yang berkelanjutan*". Lebih lanjut, terdapat 4 (empat) aspek ruang lingkup dari Qanun tersebut yang meliputi:

a. Setiap pelaku usaha baik kelompok usaha mikro, kecil, menengah maupun besar yang melakukan usaha di Aceh serta melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut Aceh, perairan kepulauan dan perairan pedalaman dalam wilayah Aceh.
b. Setiap orang, badan usaha baik warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang mengolah, memproduksi, serta memasarkan hasil sumber daya ikan (dalam) di wilayahh Aceh.
c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang ada di laut Aceh, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman dalam wilayah Aceh.
d. Setiap usaha perikanan yang melakukan usaha berdasarkan penanaman modal asing di Aceh dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Meskipun produk kebijakan tersebut merupakan inisiatif yang baik, dan klausul Pasal yang termuat di dalamnya cukup banyak yakni 86 Pasal, namun detail substansinya terbatas pada pengaturan mengenai aspek perikanan saja. Belum mencakup seluruh aspek substansial dan esensial dari entitas kelautan seperti: pariwisata, industri pengolahan non-perikanan, lingkungan hidup, pelayaran, dan aspek-aspek fundamental lainnya. Padahal Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia telah mengamanatkan agar pemerintah daerah (khususnya yang memiliki potensi besar sumber daya kelautan) untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk membantu mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

Semua upaya-upaya tersebut akan sulit dilakukan tanpa adanya pengaturan/regulasi/kebijakan khusus yang secara komprehensif memuat *governance* pembangunan ekonomi kelautan di Kota Banda Aceh. Di sisi lain, dalam praktiknya intensi dan implementasi pembangunan ekonomi kelautan di suatu entitas kemungkinan besar akan menghasilkan kombinasi dampak sosial negatif dan positif serta dinamika yang kompleks bagi berbagai kelompok masyarakat, sehingga membutuhkan pengaturan/ regulasi/kebijakan yang lebih komprehensif pula. Para sarjana kebijakan publik, khususnya yang memiliki *concern* terhadap isu *blue economy* (ekonomi kelautan) menyadari betul potensi eksternalitas negatif pembangunan ekonomi kelautan tersebut.

Terdapat beberapa rumusan tesis strategi optimalisasi potensi kelautan dari perspektif kebijakan publik yang dapat dipertimbangkan untuk diadopsi di berbagai entitas pemerintahan, termasuk oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu daerah potensial dalam pembangunan ekonomi kelautan di Indonesia. *Pertama*, tesis yang disampaikan oleh Bennett dkk [79] yang sangat mendorong para pengampu kebijakan (*policy makers*) ekonomi kelautan untuk menitikberatkan kebijakan ekonomi kelautan yang berbasis keadilan (*justice*). Kerangka kerja tesis tersebut tercermin pada gambar berikut ini:

Gambar 4.2. Kerangka Kerja Kebijakan Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan Berbasis Keadilan

Sumber: Bennett dkk (2021)

Kerangka kerja tersebut mendorong para pengampu kebijakan ekonomi kelautan untuk menghindari ketidakadilan dan mendorong hasil yang lebih *fair* selama pembangunan ekonomi kelautan. Terdapat 10 dimensi utama yang memerlukan perhatian untuk memajukan keadilan ekonomi kelautan sebagai berikut:

a. Mengakui dan melindungi hak kepemilikan dan akses terhadap sumber daya dan tata ruang kelautan.
b. Mengambil pendekatan kehati-hatian untuk mengurangi polusi dan memastikan bahwa beban lingkungan laut tidak dibebankan pada kelompok marginal.
c. Meminimalkan dampak pembangunan terhadap habitat, sumber daya, dan jasa ekosistem kelautan.

d. Mempertimbangkan dan menjaga hak akses dan penghidupan nelayan skala kecil.
e. Memelihara dan meningkatkan akses terhadap sumber daya kelautan yang diperlukan untuk ketahanan dan kesejahteraan pangan.
f. Mengembangkan kebijakan dan mekanisme untuk mendorong dan menjamin pemerataan manfaat ekonomi kelautan.
g. Memantau, memitigasi dan mengelola dampak sosial dan budaya dari pembangunan kelautan.
h. Mengakui, memasukkan dan mendorong kesetaraan peran perempuan dalam perekonomian kelautan.
i. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia dan masyarakat adat.
j. Mengembangkan proses perencanaan dan tata kelola yang inklusif dan partisipatif untuk pembangunan ekonomi kelautan.

Rekomendasi tersebut didukung oleh deklarasi internasional dan perjanjian sukarela – seperti *Universal Declaration on Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), *United Nations Declaration on Indigenous Rights* (Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat), dan *the Voluntary Guidelines for Small-Scale Fisheries* (Pedoman Sukarela untuk Perikanan Skala Kecil) dan dikodifikasikan dalam *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan) di Kanada. Dalam konteks pertimbangan adopsi maupun elaborasi tesis tersebut di Kota Banda Aceh, berikut beberapa strategi optimalisasi potensi ekonomi kelautan yang dapat dilakukan dari perspektif kebijakan publik:

a. Pengarusutamaan Keadilan: Memastikan bahwa kebijakan ekonomi kelautan di Kota Banda Aceh secara kontinyu memperhatikan dan menginternalisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial, dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional dan komunitas pesisir serta memastikan distribusi manfaat yang adil.
b. Konsultasi dan kolaborasi dengan pelbagai *Stakeholder*: Segala upaya pembangunan ekonomi kelautan di Kota Banda Aceh harus dapat melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, nelayan,

pelaku usaha, LSM, dan akademisi, dalam proses perencanaan maupun pengembangan kebijakan ekonomi kelautan di Kota Banda Aceh.

c. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal, terutama nelayan dan komunitas pesisir, dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan usaha ekonomi kelautan. Dari sini, kebijakan yang dihasilkan maupun dikembangkan akan lebih deliberatif.
d. Pengelolaan Adaptif: Mengadopsi pendekatan pengelolaan adaptif yang responsif terhadap perubahan lingkungan dan sosial yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh, dengan melakukan pemantauan terus-menerus dan penyesuaian kebijakan secara berkala, termasuk (misalnya) mitigasi bencana seperti Tsunami, sehingga pembangunan ekonomi kelautan dapat dilakukan dengan aman dan nyaman.
e. Penguatan Kebijakan dan Regulasi: Mengadopsi kebijakan dan regulasi yang mendukung prinsip-prinsip keadilan sosial, distribusi yang adil, dan perlindungan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya kelautan di sekitar Kota Banda Aceh. Hal ini tentu dapat dilakukan dengan (misalnya) memasukkan aspek-aspek ekonomi kelautan ke dalam berbagai dokumen perencanaan, seperti: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor ekonomi kelautan terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan yang inklusif. *Kedua*, tesis Sari dan Muslimah [74] yang menjelaskan bahwa konsep ekonomi kelautan dibangun dengan 2 (dua) prinsip. Prinsip pertama efisiensi alam, dimana ekonomi kelautan meniru ekosistem alam dan bekerja sesuai dengan apa yang disediakan alam secara efisien dan tidak mengurangi, namun justru memperkaya alam. Prinsip kedua adalah *zero waste*, artinya sampah dari satu sumber menjadi makanan atau sumber energi bagi sumber lain, sehingga sistem kehidupan dalam ekosistem menjadi seimbang dan berkelanjutan. *Blue economy* (ekonomi

kelautan) merupakan model pembangunan ekonomi yang menyatukan pembangunan laut dan darat, dengan menekankan pada pemanfaatan optimalisasi teknologi, guna meningkatkan tingkat pemanfaatan sumber daya kelautan.

Inovasi menjadi kata kunci dalam penerapan prinsip ekonomi kelautan dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya di Kota Banda Aceh. Inovasi diperlukan untuk meningkatkan produksi perikanan, sekaligus berupaya menjamin kelestarian stok sumber daya ikan dan sumber daya kelautan lainnya di masa depan. Pemerintah Kota Banda Aceh perlu berupaya melakukan penelitian terhadap terobosan inovasi dan teknologi tepat guna yang dapat digunakan dalam pengelolaan perikanan. Menempatkan teknologi sebagai landasan penting dalam inovasi pembangunan ekonomi krusial, karena dapat mempercepat pertumbuhan dan diversifikasi produk yang dihasilkan masyarakat, memanfaatkan sampah sebagai alat produksi hingga menghasilkan produk baru.

Lebih lanjut, integrasi ekonomi kelautan dalam pengelolaan sumber daya laut memerlukan harmonisasi berbagai sektor. Hal inilah yang mendasari perumusan model integrasi ekonomi kelautan (khususnya dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan) sebagaimana tergambar berikut ini:

Gambar 4.3. Model Optimalisasi Ekonomi Kelautan Terintegrasi Berbasis Inovasi Teknologi
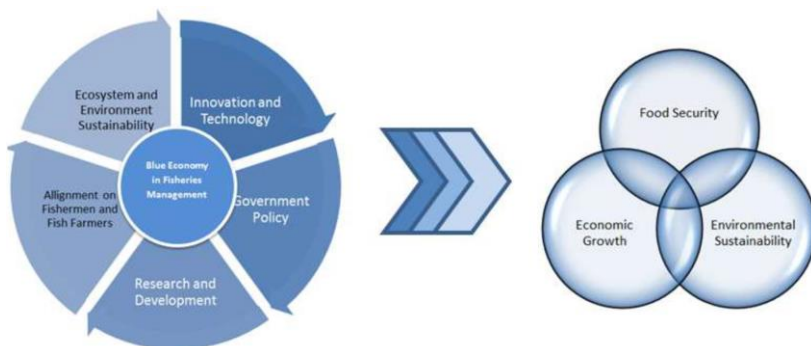
Sumber: Sari & Muslimah (2019)

Model optimalisasi ekonomi kelautan berbasis integrasi berbasis inovasi teknologi tersebut memuat dimensi-dimensi berikut:

a. Inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi berperan sebagai penggerak (*enabler*) yang memungkinkan teknik pengelolaan perikanan menjadi lebih efisien, dan menghasilkan produksi lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi kelautan yang mengharuskan penggunaan metode yang efisien dan inovatif, dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem dan lingkungan. Dengan adanya inovasi-inovasi baru pemanfaatan teknologi sumber daya perikanan, diharapkan dapat dikembangkan teknik-teknik pengelolaan ikan yang baru sehingga alam dapat memperkaya dirinya sendiri, merekayasa ekosistem yang lebih baik bagi alam atau memunculkan varietas unggul sumber daya ikan yang lebih baik dan dapat menghasilkan lebih banyak kuantitas ikan.
b. Kelestarian ekosistem dan lingkungan. Ekonomi kelautan mensyaratkan bahwa pembangunan ekonomi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penangkapan ikan dengan cara yang dapat merugikan lingkungan harus dihindari dan diganti dengan pengelolaan perikanan yang memperhatikan kelestarian sumber daya ikan, karena sumber daya tersebut terbatas dan masih perlu dilestarikan untuk masa depan. Pemilihan cara penangkapan ikan yang menghindari kerusakan ekosistem, menghindari penangkapan ikan yang berlebihan, menghindari penangkapan ikan-ikan kecil yang dilindungi, dan meminimalkan limbah merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha perikanan. Pertumbuhan ekonomi perikanan yang tinggi akan sia-sia jika ekosistemnya rusak dan tidak ada jaminan pertumbuhan ekonomi dapat bertahan di masa depan.
c. Keberpihakan pada nelayan dan pembudidaya ikan. Peningkatan perekonomian kelautan dan perikanan secara makro harus juga meningkatkan perekonomian mikro pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan dan pembudi daya ikan. Pembangunan ekonomi dalam ekonomi biru juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak

hanya meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan, namun juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia nelayan dan pembudi daya ikan. Mereka juga harus dibekali kemampuan tidak hanya sekedar menangkap, mengolah, dan menjual hasilnya, namun juga diajarkan tentang upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas usahanya, terutama menggunakan teknik-teknik baru yang inovatif sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuannya. perikanan dan kemungkinan menciptakan lapangan kerja baru.

d. Kebijakan pemerintah. Jika dirangkum dari dasar pengelolaan perikanan, terdapat 3 (tiga) landasan utama dalam perumusan kebijakan terkait pengelolaan perikanan, yaitu: Pertama, pengendalian *input*, yaitu masukan dari kegiatan perikanan yang dapat dikendalikan. Hal ini mencakup kebijakan pengaturan wilayah pengelolaan perikanan, dan jumlah kapal penangkap ikan yang diperbolehkan menangkap ikan. Kedua, pengendalian keluaran, yaitu keluaran kegiatan perikanan yang dapat dikendalikan. Hal ini mencakup jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan analisis tingkat pemanfaatan ikan di suatu wilayah pengelolaan perikanan. Ketiga, tindakan teknis, yang diperbolehkan dalam kegiatan penangkapan ikan. Hal ini mencakup jenis dan cara penangkapan ikan yang diperbolehkan, serta waktu penangkapan ikan yang diperbolehkan. Ekonomi kelautan memerlukan komitmen pemerintah untuk menetapkan kebijakan terkait ketiga aspek di atas, dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar kegiatan pengelolaan perikanan tetap berada pada arah yang berkelanjutan.

e. Penelitian dan pengembangan. Kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan upaya untuk menemukan cara baru dalam pengelolaan perikanan sesuai dengan prinsip ekonomi kelautan. Pada tahun 2018, anggaran penelitian nasional hanya berkisar 0,3% dari PDB nasional, jumlah yang relatif kecil dan seharusnya bisa jauh lebih ditingkatkan. Selain itu, upaya penelitian dan pengembangan akan lebih baik jika dilakukan dengan prinsip *open science*, dimana hasil

penelitian dipublikasikan dan masyarakat mempunyai akses yang luas terhadap hasil penelitian tersebut tanpa adanya komersialisasi yang akan dengan cepat mendorong pelaku usaha perikanan untuk mengembangkan inovasi dan meningkatkan produksi perikanannya.

Dalam konteks pertimbangan adopsi maupun elaborasi tesis tersebut di Kota Banda Aceh, berikut beberapa strategi optimalisasi potensi ekonomi kelautan yang dapat dilakukan dari perspektif kebijakan publik:

a. Pengelolaan Terpadu: Mengembangkan pendekatan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan sumber daya kelautan di sekitar Kota Banda Aceh, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan budaya (seperti tarik pukat dan hari pantang melaut). Keterpaduan pengelolaan ini akan membuat pembangunan ekonomi kelautan Kota Banda Aceh tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, sehingga lebih komprehensif.
b. Pendidikan dan Pelatihan: Melakukan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam praktik-praktik ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan efisien, juga (terutama) terhadap para implementor kebijakan ekonomi kelautan di Kota Banda Aceh.
c. Pendekatan Berbasis Ekosistem: Menggunakan pendekatan berbasis ekosistem dalam perencanaan dan pengelolaan ekonomi kelautan di sekitar Kota Banda Aceh, dengan memperhatikan keberagaman hayati dan keseimbangan ekosistem laut. Pendekatan ini juga perlu diiringi dengan penguatan peran Lembaga Adat Panglima Laot Kota Banda Aceh, sehingga seluruh aktivitas pembangunan ekonomi kelautan di Kota Banda Aceh akan senantiasa memperhatikan ekosistem kelautan secara utuh.
d. Pengembangan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor ekonomi kelautan, seperti pelabuhan, dermaga, fasilitas pengolahan, dan pusat distribusi perlu diakomodir untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor kelautan dan mengintegrasikannya dengan seluruh lokus-lokus strategis di Kota Banda Aceh.
e. Inovasi dan Teknologi: Mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi,

produktivitas, dan keberlanjutan sektor ekonomi kelautan, seperti teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan atau sistem pemantauan perikanan yang canggih. Inovasi dan teknologi tersebut dapat dihasilkan dari riset-riset yang dilakukan secara kolaboratif antara akademisi dari perguruan tinggi dengan pemerintah daerah Kota Banda Aceh.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini dengan cermat dan berkelanjutan, diharapkan Kota Banda Aceh dapat mengoptimalkan potensi sektor ekonomi kelautan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal serta lingkungan laut yang berkelanjutan. Integrasi dan keselarasan seluruh aspek di atas juga diharapkan mampu memajukan pembangunan ekonomi kelautan, khususnya pada aspek pengelolaan perikanan guna mendukung capaian tujuan utama pembangunan perikanan nasional, yaitu tercapainya ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Ketiga, tesis Pace, Saritas, dan Deidun [80] yang melakukan analisis dampak silang kualitatif tentang bagaimana skenario pembangunan ekonomi kelautan (*blue economy*) kemungkinan besar akan berkembang dan dampaknya terhadap PESTLE (*Political, Economic, Social, Technological, Environmental*, *Legal*). Tesis mereka mengarah pada penyusunan 6 (enam) skenario yang belum tentu saling eksklusif, melainkan mewakili pandangan alternatif masa depan mengenai perkembangan lintas sub-sektor dan tema ekonomi kelautan (lihat gambar 4.4).

Pada gambar 4.4, skenario diberi nomor dari 1→6. Panel tengah pada diagram mencantumkan 9 (sembilan) tema yang diprioritaskan dari 6 (enam) skenario. Skenario-skenario tersebut memiliki elemen normatif dalam menggambarkan jalur-jalur yang memungkinkan untuk mengembangkan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Namun, hal tersebut tidak terbatas pada deskripsi "*business as usual*" atau visi utopis. Kerangka kebijakan ini mendorong para pengampu kebijakan ekonomi kelautan (*blue economy*) untuk membayangkan masa depan alternatif, dan hal ini membuka peluang terhadap berbagai bidang intervensi yang mungkin dilakukan, dan bukannya bersifat preskriptif mengenai jalur masa depan dan menggambarkan peta jalan untuk mencapai hal tersebut sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 4.4. Kerangka Kerja Skenario Masa Depan untuk Kebijakan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan

Sumber: Pace, Saritas, dan Deidun (2023)

Berdasarkan gambar tertera di atas, terdapat 6 (enam) skenario kebijakan dalam pembangunan ekonomi kelautan yang meliputi:

a. Skenario 1 (komunitas ramah lingkungan yang mandiri). Pada skenario ini, kebijakan ekonomi kelautan didorong untuk mewujudkan komunitas ramah lingkungan yang sangat terhubung secara digital yang dibangun di wilayah pesisir, juga mengandalkan produksi energi yang terdesentralisasi dan sistem polikultur *loop* tertutup. Masyarakat menjadi agen aktif yang mendorong inovasi sosial di lingkungan pesisir dan laut. Pada skenario ini, efisiensi juga ditekankan untuk dioptimalkan dalam budidaya perikanan agar meningkatkan kualitas air dan kehidupan akuatik, menuju sistem polikultur *loop* tertutup.
b. Skenario 2 (masa depan bergantung pada data). Skenario ini bertumpu pada model dan prediksi laut yang kuat berdasarkan data holistik (terutama geo-fisik dan biologis) sehingga memberikan perspektif kebijakan terpadu mengenai keadaan laut. Data akses terbuka yang "*ready-to-*

use" memfasilitasi pemantauan keadaan wilayah pesisir dan intervensi kebijakan yang tepat waktu untuk memitigasi tekanan antropogenik. Data lintas sektoral yang dapat dibandingkan juga dapat memfasilitasi penilaian sumber daya kelautan dan jasa ekosistem yang didukungnya.

c. Skenario 3 (masyarakat yang terlibat). Pendekatan partisipatif dari bawah ke atas melibatkan masyarakat dan aktor masyarakat lainnya dalam kebijakan dan penelitian kelautan dan analisis data, sehingga menjembatani kesenjangan komunikasi antara ilmu pengetahuan dan masyarakat. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber memungkinkan pemantauan 360 derajat terhadap kondisi kesehatan lautan. Skenario ini memungkinkan masyarakat terinformasi dan bertanggung jawab, sehingga mempengaruhi kecepatan perubahan kebijakan dan demokratisasi tata kelola ekonomi kelautan.

d. Skenario 4 (berbagi sumber daya dan infrastruktur secara bersama-sama). Perencanaan kebijakan ekonomi kelautan yang kolaboratif, multi-skala dan lintas sektoral akan menghasilkan peningkatan pemanfaatan wilayah dan sumber daya pesisir yang terbatas. Peningkatan koordinasi infrastruktur yang ada (misalnya, penggunaan bersama kapal penangkap ikan dan fasilitas produksi) memfasilitasi transisi menuju nihil limbah dari sektor perikanan dan akuakultur. Inovasi teknologi dan pengetahuan memungkinkan ekstraksi dan eksploitasi barang berharga.

e. Skenario 5 (jasa ekosistem yang berkembang pesat). Analisis dan pemodelan pada skenario ini mendukung kebijakan intelijen maritim untuk manajemen armada, dan pemantauan polusi, serta menyediakan layanan inovatif yang terkait dengan pengendalian imigrasi dan keamanan maritim. Digitalisasi pelabuhan dapat memicu boomingnya industri jasa maritim. Pengelolaan sumber daya perikanan yang berbasis data dan terintegrasi menghasilkan hasil keberlanjutan kebijakan ekonomi kelautan yang optimal.

f. Skenario 6 (Bioteknologi biru 3.0). Solusi bioteknologi yang inovatif secara drastis meningkatkan efisiensi pemurnian air dan meningkatkan akses terhadap air minum, sehingga mengubah pola migrasi yang disebabkan oleh air. Modifikasi

genetik dan komersialisasi mikroba GM baru dan produk mikroba (enzim) meningkatkan penggunaan limbah yang berbeda dan membantu memerangi polusi mikroplastik. Ketertelusuran mikroba dapat meningkatkan kualitas dan keamanan nutrisi serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap bioproduk laut.

Meskipun skenario-skenario tersebut bertujuan untuk mengembangkan masa depan yang optimis, beberapa permasalahan yang saling bertentangan juga teridentifikasi. Hal ini timbul dari berbagai pemanfaatan pesisir dan ruang laut serta dampaknya terhadap perikanan skala kecil-menengah, dan mata pencaharian masyarakat adat yang berkembang di sektor tradisional, serta tantangan penerapan energi terbarukan skala besar dan perluasan infrastruktur budidaya perikanan, serta konflik dengan pariwisata dan perikanan. Meskipun tantangan lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam skenario ini, tren politik dan sosio-ekonomi global lainnya yang akan datang kemungkinan besar juga mempunyai dampak jangka menengah dan panjang terhadap masa depan lautan dan pesisir serta aktivitas-aktivitas terkait. Diantaranya adalah ketegangan geopolitik dan meningkatnya ancaman keamanan siber yang mengganggu transportasi laut dan perdagangan dunia.

Faktor-faktor lainnya misalnya yang terkait dengan proteksionisme perdagangan dan dinamika pasar tenaga kerja baru, serta iklim ekstrem yang dapat mempengaruhi arus migrasi dan berkontribusi terhadap peningkatan disparitas ekonomi. Tren-tren ini memberikan tekanan baru terhadap permintaan akan sumber daya alam yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan sosial-ekonomi yang terkait dengan lingkungan laut dan pesisir. Di sisi lain, terdapat elemen-elemen yang menonjol dalam seluruh skenario, bukan sebagai titik pertikaian atau konflik, melainkan sebagai aspek yang dapat dimanfaatkan dalam perubahan untuk mencapai jalur keberlanjutan. Hal ini mencakup pentingnya inovasi sosial dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap bioteknologi baru dan melibatkan aktor-aktor masyarakat dalam membentuk agenda penelitian maupun agenda kebijakan untuk ekonomi kelautan. Selain itu, akses data

terbuka sebagai pendukung tata kelola laut yang transparan juga memainkan peran yang sangat penting.

Dalam konteks pertimbangan adopsi maupun elaborasi tesis tersebut di Kota Banda Aceh, berikut beberapa strategi optimalisasi potensi ekonomi kelautan yang dapat dilakukan dari perspektif kebijakan publik:

a. Diversifikasi Ekonomi Kelautan: Mengembangkan strategi untuk diversifikasi ekonomi kelautan di Kota Banda Aceh, termasuk pengembangan pariwisata laut berkelanjutan, budidaya laut, industri pengolahan hasil laut, dan jasa lingkungan laut.
b. Peningkatan Produksi Perikanan: Produksi perikanan perlu ditingkatkan, terutama dengan menambah dan memperluas wilayah tambak perikanan laut di Kota Banda Aceh. Jika selama ini hanya 4 Kecamatan yang memiliki tambak perikanan laut (Meuraxa, Kuta Alam, Kuta Raja, dan Syiah Kuala), maka kedepan 5 Kecamatan lainnya yakni: Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, dan Ulee Kareng juga perlu memiliki tambak perikanan laut. Penambahan tambak-tambak tersebut perlu diiringi dengan proyeksi target peningkatan produksi ikan sebesar 20%-30%, sehingga nilai produksi perikanan laut juga meningkat 73 hingga 110 milyar rupiah per tahun.
c. Pendekatan Berbasis Bukti: Mengadopsi pendekatan berbasis bukti dalam merancang kebijakan ekonomi kelautan, dengan mempertimbangkan temuan dari penelitian ilmiah dan pengalaman praktis dari implementasi kebijakan sebelumnya.
d. Pembangunan Ekonomi Kelautan sebagai Kebijakan Prioritas. Upaya pembangunan ekonomi kelautan di Kota Banda Aceh perlu secara konkret ditetapkan sebagai kebijakan prioritas, dan dimasukkan ke dalam penyusunan agenda (*agenda setting*) pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh secara konsisten.
e. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan terus-menerus, dan evaluasi yang obyektif terhadap implementasi kebijakan dan program y ang berhubungan dengan ekonomi kelautan di Kota Banda Aceh. Pemantauan dan evaluasi harus

dilakukan secara berkala, untuk memastikan progress pembangunan ekonomi kelautan dan mengevaluasi dampaknya, terutama terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Pertimbangan adopsi maupun elaborasi berbagai tesis tersebut di atas, dalam rangka strategi optimalisasi potensi ekonomi kelautan di Kota Banda Aceh dari perspektif kebijakan publik perlu memperhatikan dan mempertimbangkan 3 (tiga) faktor pemungkin (*enabling factor*) yaitu: ketersediaan investasi, teknologi dan inovasi, serta sumber daya. Pada fase paling awal (periode 2024-2027), sebaiknya berfokus pada 2 (dua) sektor saja, yaitu perikanan dan wisata bahari. Kunci keberhasilannya ada pada penguatan ekosistem hulu-hilir usaha perikanan rakyat dan pelibatan lebih banyak lagi masyarakat lokal dalam pengembangan wisata alam.

Sementara untuk fase menengah (periode 2028 hingga 2031), selain menjaga keberlanjutan pemanfaatan kedua sektor ekonomi sebelumnya (perikanan dan wisata bahari), Pemerintah Kota Banda Aceh juga sudah harus mulai berinvestasi mempersiapkan sektor masa depan yang sedang berkembang (*emerging future sector*): mulai dari energi terbarukan, perkapalan, kepelabuhanan, logistik dan rantai dingin hingga desalinasi air dan kimia berbasis laut. Kulminasinya (yakni periode 2031 hingga 2040 atau menuju 100 tahun Indonesia merdeka) seluruh potensi ekonomi kelautan daerah sudah dapat digerakkan secara mapan, inklusif dan berkelanjutan, dengan penggunaan teknologi tinggi.

Pada fase lanjutan ini, akselerasi potensi ekonomi kelautan diharapkan sudah berada pada titik ideal antara pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan ekologi. Syaratnya, prioritas sektor ekonomi biru di tiap-tiap fase harus diikuti dengan penyesuaian fokus anggaran yang memadai dan postur kelembagaan yang proporsional. Maka, keberhasilan mengakselerasi ekonomi kelautan seharusnya menjadi salah satu solusi menghadapi tantangan ekonomi di Kokta Banda Aceh, sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

1. Martínez-Vázquez, R. M., Milán-García, J., & de Pablo Valenciano, J. (2021). Challenges of the Blue Economy: evidence and research trends. *Environmental Sciences Europe*, *33*(1), 61.
2. Smith-Godfrey, S. (2016). Defining the blue economy. *Maritime affairs: Journal of the national maritime foundation of India*, *12*(1), 58–64.
3. Ministry of National Development Planning. (2021). *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation*. (Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS), Ed.) (1st ed., Vol. 1). Jakarta: Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS).
4. Kathijotes, N. (2013). Keynote: Blue economy-environmental and behavioural aspects towards sustainable coastal development. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *101*, 7–13.
5. Phelan, A., Ruhanen, L., & Mair, J. (2020). Ecosystem services approach for community-based ecotourism: towards an equitable and sustainable blue economy. *Journal of Sustainable Tourism*, *28*(10), 1665–1685.
6. Islands, S. I. K. M., PICs, N. P., Kiribati, S. I. V., & Palau, M. I. N. (2015). CONTEXT AND RECENT DEVELOPMENTS.
7. Muhaimid, H. S., Saleh, M. I., & Mohammed, O. A. (2022). Measuring The Impact Of The Blue Economy On Economic Growth For The Period 2010-2019, Selected European Countries. *Journal of Positive Sciences (JPS)*, *11*(1).
8. Hussein, A. I., ALSaqa, Z. H., & Mahmood, S. M. (2020). Enhance financial efficiency under IFRS standards to reduce

financial fragility/An empirical study of the reality of crises in Iraq using Data envelopment analysis. *Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences*, *16*(Special Issue part 1).

9. Ismail, S. A. A., Mahmood, S. M., & Hussein, A. I. (2021). The impact of the agency costs on the going concern under the auditor industry specialization: An empirical study on private banks in Iraq. *Academy of Entrepreneurship Journal*, *27*, 1–11.
10. Alharthi, M., & Hanif, I. (2020). Impact of blue economy factors on economic growth in the SAARC countries. *Maritime Business Review*, *5*(3), 253–269.
11. Karani, P., & Failler, P. (2020). Comparative coastal and marine tourism, climate change, and the blue economy in African Large Marine Ecosystems. *Environmental Development*, *36*, 100572.
12. Bhattacharya, P., & Dash, A. K. (2020). *Drivers of blue economy in Asia and Pacific island countries: an empirical investigation of tourism and fisheries sectors*. ADBI Working Paper Series.
13. Cisneros-Montemayor, A. M., Sumaila, U. R., Kaschner, K., & Pauly, D. (2010). The global potential for whale watching. *Marine Policy*, *34*(6), 1273–1278.
14. Assevero, V.-A., & Chitre, S. P. (2012). Rio 20-An Analysis of the Zero Draft and the Final Outcome Document'The Future We Want'. *Available at SSRN 2177316*.
15. Klinger, D. H., Eikeset, A. M., Davíðsdóttir, B., Winter, A.-M., & Watson, J. R. (2018). The mechanics of blue growth: management of oceanic natural resource use with multiple, interacting sectors. *Marine Policy*, *87*, 356–362.
16. Eikeset, A. M., Mazzarella, A. B., Davíðsdóttir, B., Klinger, D. H., Levin, S. A., Rovenskaya, E., & Stenseth, N. C. (2018). What is blue growth? The semantics of "Sustainable Development" of marine environments. *Marine Policy*, *87*, 177–179.
17. Bari, A. (2017). Our oceans and the blue economy: Opportunities and challenges. *Procedia engineering*, *194*, 5–11.
18. Soma, K., van den Burg, S. W. K., Selnes, T., & van der Heide, C. M. (2019). Assessing social innovation across offshore

sectors in the Dutch North Sea. *Ocean & Coastal Management*, *167*, 42–51.

19. Cisneros-Montemayor, A. M., Moreno-Báez, M., Reygondeau, G., Cheung, W. W. L., Crosman, K. M., González-Espinosa, P. C., … Swartz, W. (2021). Enabling conditions for an equitable and sustainable blue economy. *Nature*, *591*(7850), 396–401.
20. Keen, M. R., Schwarz, A.-M., & Wini-Simeon, L. (2018). Towards defining the Blue Economy: Practical lessons from pacific ocean governance. *Marine Policy*, *88*, 333–341.
21. Rahman, A., Mawar, M., & Hermanto, A. (2023). Optimalization the Blue Economy Policy of the Tourism Sector using E-Government in the Coastal Area of Ambon Island. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 440, p. 06004). EDP Sciences.
22. ASEAN. (2023). *ASEAN Blue Economy Framework*. Vietnam. Retrieved from https://asean.org/wp-content/uploads /2023/ 09/ ASEAN-Blue-Economy-Framework.pdf
23. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. (2023). *Rencana Kerja Dkp Aceh Tahun 2023*.
24. BPS Kota Banda Aceh. (2022). Kota Banda Aceh Dalam Angka. *Badan Pusat Statistik Kota Banda aceh*, 5–24.
25. Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa). *Jurnal Governance*, *2*(1), 1–9.
26. Ley 25.632. (2002). *Bumi Manise (Wajah Pariwisata Pesisir Pulau Ambon Dalam Perspektif Blue Economy Berbasis Kearifan Lokal)*.
27. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. (2023). *Rencana Kerja Dkp Aceh Tahun 2023*.
28. DKP-Aceh. (2011). Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh 2020, (Wpp Ii), 1–130.
29. DKP-Aceh. (2011). Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh 2020, (Wpp Ii), 1–130.
30. PEMKO Banda Aceh. (2017). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2017-2022.
31. BPS Kota Banda Aceh. (2023). *Kecamatan Kuta Alam Dalam Angka 2023*.

32. PEMKO Banda Aceh. (2017). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2017-2022.
33. Realisasi Investasi Sektor Perikanan Paling Rendah, Ini Penyebabnya. (n.d.).
34. Viii, V., & Sirait, R. A. (2023). Peluang dan Tantangan Blue Partisipasi Publik Dalam Parlemen Saat Pembahasan Pendapatan Negara di Tengah Ketidakpastian Perekonomian Global Dewan Redaksi Peluang dan Tantangan Blue Economy Pendapatan Negara di Tengah Ketidakpastian, *VIII*, 1–16.
35. Viii, V., & Sirait, R. A. (2023). Peluang dan Tantangan Blue Partisipasi Publik Dalam Parlemen Saat Pembahasan Pendapatan Negara di Tengah Ketidakpastian Perekonomian Global Dewan Redaksi Peluang dan Tantangan Blue Economy Pendapatan Negara di Tengah Ketidakpastian, *VIII*, 1–16.
36. Investasi Sektor Perikanan dan Kelautan Aceh Perlu dioptimalkan. (n.d.).
37. Donesia, E. A., Widodo, P., Saragih, H. J. R., Suwarno, P., & Widodo. (2023). Konsep Blue Economy Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(2), 1950–1959.
38. UNWTO. (2007). Tourism Highlights, 12 p.
39. Prayuda, R., Sary, D. V., & Riau, U. I. (2019). STRATEGI INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KONSEP BLUE ECONOMY TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. *Indonesian Journal of International Relations*, *3*(2), 46–64.
40. Yudharto, T. K., Pendidikan, P., Angkatan, R., Ketahanan, L., & Ri, N. (2023). PADA KONSEP BLUE ECONOMY GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR Oleh :
41. Hasibuan, A. T. H., Syahriza, R., & Syahbudi, M. (2024). Implementasi Konsep “Blue Economy” Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Kota Medan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus:Kecamatan Medan Labuhan). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, *1*(3), 585–588.

42. Iverson, B. L., & Dervan, P. B. (n.d.). Pengembangan Potensi Ekonomi Kawasan Pesisir Dalam Peningkatan Kesejahtera-an Masyarakat, 7823–7830.
43. Riyadi, P. H., & Wijayanto, D. (2020). Manajemen industri perikanan, (February).
44. Pellokila, I. R., & Sagala, N. (2019). Strategi Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Di Kawasan Pantai Oesapa. *Tourism - Jurnal Pariwisata*, *2*(1), 47. https://doi.org/ 10.32511/tourism.v2i1.319
45. Hanine, S., Dinar, B., & Meftah, S. (2024). The blue economy 3.0: innovation for a sustainable ocean economy in Morocco. *International Journal of Economic Studies and Management (IJESM)*, (January). https://doi.org/10.5281/zenodo.1046 1861
46. Nham, N. T. H., & Ha, L. T. (2023). The role of financial development in improving marine living resources towards sustainable blue economy. *Journal of Sea Research*, *195*(March), 102417. https://doi.org/10.1016/j.seares. 2023.102417
47. E A Alqattan, M. (2024). The Kuwaiti blue economy and its potential obstacles. *Heliyon*, *10*(10), e30975. https:// doi.org/ 10.1016/j.heliyon.2024.e30975
48. United Nations Environment Programme. (2024). Sustainable Blue Economy. Retrieved March 30, 2024, from https://www.unep.org/topics/ocean-seas-and-coasts/ecosystem-based-approaches/sustainable-blue-economy
49. Spalding, M. J. (2016). The new blue economy: the future of sustainability. *Journal of Ocean and Coastal Economics*, *2*(2), 8.
50. Visbeck, M., Kronfeld-Goharani, U., Neumann, B., Rickels, W., Schmidt, J., Van Doorn, E., ... Quaas, M. F. (2014). Securing blue wealth: The need for a special sustainable development goal for the ocean and coasts. *Marine Policy*, *48*, 184–191.
51. Hadjimichael, M. (2018). A call for a blue degrowth: unravelling the European Union’s fisheries and maritime policies. *Marine Policy*, *94*, 158–164.
52. Ferrol-Schulte, D., Gorris, P., Baitoningsih, W., Adhuri, D. S., & Ferse, S. C. A. (2015). Coastal livelihood vulnerability to

marine resource degradation: A review of the Indonesian national coastal and marine policy framework. *Marine policy*, *52*, 163–171.

53. Bennett, N. J., Blythe, J., White, C. S., & Campero, C. (2021). Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy. *Marine Policy*, *125*, 104387.
54. Chen, S., De Bruyne, C., & Bollempalli, M. (2020). Blue economy: community case studies addressing the poverty–environment nexus in ocean and coastal management. *Sustainability*, *12*(11), 4654.
55. Bax, N., Novaglio, C., Maxwell, K. H., Meyers, K., McCann, J., Jennings, S., … Fischer, M. (2021). Ocean resource use: building the coastal blue economy. *Reviews in fish biology and fisheries*, 1–19.
56. Box, R. C. (2014). Running government like a business: Implications for public administration theory and practice. In *Public Administration and Society* (pp. 251–269). Routledge.
57. Dahl, R. A. (2018). The science of public administration: Three problems. In *Democracy, bureaucracy, and the study of administration* (pp. 60–76). Routledge.
58. Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public policy: A new introduction*. Bloomsbury Publishing.
59. Kuipers, B. S., Higgs, M., Kickert, W., Tummers, L., Grandia, J., & Van der Voet, J. (2014). The management of change in public organizations: A literature review. *Public administration*, *92*(1), 1–20.
60. United Nation Development Program. (2024). Conserve and Sustainably Use The Oceans, Seas and Marine Resources For Sustainable Development. Retrieved March 31, 2024, from https://www.globalgoals.org/goals/14-life-below-water/
61. Indonesia, P. R. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025*.
62. Indonesia, R. (2020). Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, *303*.
63. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan

Kelautan Indonesia (2017). Indonesia: https://peraturan. bpk.go.id/Details/62168. Retrieved from https://peraturan .bpk.go.id/ Details/62168
64. Mawar, M., Rahman, A., & Hermanto, A. (2023). *BUMI MANISE Wajah Pariwisata Pesisir Pulau Ambon dalam Perspektif Blue Economy Berbasis Kearifan Lokal*. Mafy Media Literasi Indonesia.
65. Wenhai, L., Cusack, C., Baker, M., Tao, W., Mingbao, C., Paige, K., … Amon, D. (2019). Successful blue economy examples with an emphasis on international perspectives. *Frontiers in Marine Science*, *6*, 261.
66. Bari, A. (2017). Our oceans and the blue economy: Opportunities and challenges. *Procedia engineering*, *194*, 5–11.
67. Zhao, R., Hynes, S., & He, G. S. (2013). Blue growth in the middle kingdom: An analysis of china's ocean economy.
68. Voyer, M., Benzaken, D., & Rambourg, C. (2022). Institutionalizing the Blue Economy: an examination of variations and consistencies among Commonwealth countries. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, *377*(1854), 20210125.
69. Olayele, F. (2023). Innovation and value creation in Canadas ocean sector: a blue economy imperative. In *Regional Economic Systems after COVID-19* (pp. 225–240). Edward Elgar Publishing.
70. Chansoria, M. (2018). Blue Economies of the Indian Ocean Region: Japan's Role in Transition to Sustainable Development and Growth. *Policy*.
71. Fisheries, E. Commission. D.-G. for M. A. and. (2012). *Blue Growth: Opportunities for marine and maritime sustainable growth: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions*. Publications Office of the European Union.
72. Gemino, I. (2018). *Potret keberhasilan program prioritas tahun 2015-2018*. Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
73. Dahuri, R. (2018). Pembangunan ekonomi kelautan dan peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi

berkualitas secara berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat. In *Seminar Bulanan SDGs Center. Universitas Padjajaran. Bandung*.
74. Sari, D. A. A., & Muslimah, S. (2020). Blue economy policy for sustainable fisheries in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 423, p. 012051). IOP Publishing.
75. Adrianto, L. (2022). *Blue Economy Development Index (BEDI) Measuring the Progress of Sustainable Blue Economy*.
76. M Riza Damanik. (2023, January 20). Solusi Ekonomi Biru 2023. Jakarta. Retrieved from https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/18/solusi-ekonomi-biru-2023
77. Ocean Health Index. (2023). 2023 OHI Assessment. Retrieved March 31, 2024, from https://oceanhealthindex.org/ global-scores/data-download/
78. Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan (2010).
79. Bennett, N. J., Blythe, J., White, C. S., & Campero, C. (2021). Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy. *Marine Policy*, *125*, 104387.
80. Pace, L. A., Saritas, O., & Deidun, A. (2023). Exploring future research and innovation directions for a sustainable blue economy. *Marine Policy*, *148*, 105433.

BIOGRAFI PENULIS

Abdul Rahman merupakan pengajar pada mata kuliah Kebijakan Publik, Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, serta Manajemen Strategis Sektor Publik di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain sebagai Dosen, saat ini Penulis juga merupakan Tenaga Ahli Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak tahun 2020. Fokus tema riset Penulis ialah: Kebijakan Publik, Kebijakan Sosial, dan Kebijakan Pendidikan. Beberapa hasil karya Penulis antara lain: 1) Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Praktek Kebijakan; 2) Optimalization the Blue Economy Policy of the Tourism Sector using E-Government in the Coastal Area of Ambon Island; dan 3) Deadly Coal Social Campaign in Environmental Policy Advocacy for Indigenous Community of Kalimantan; dan 4) Policy Formulation in Integrating Vocational Education Graduates with the Labor Market in Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: abdul.rahman@umj.ac.id.

Desy Puspita Lahir di Banda Aceh pada 29 Desember 1984 dan saat ini menetap di Banda Aceh. Menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Swasta Al-Alaq, Krueng Geukueh-Aceh Utara pada tahun 1996, dan melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Lhokseumawe dan menamatkan Pendidikan menengah pertamanya di SMPN 1 Banda Aceh pada Tahun 2000. Pendidikan Menengah Atas diselesaikan pada Tahun 2003 di SMAN 3 Banda Aceh. Setelah menamatkan sarjananya pada Tahun 2008 di Agribisnis Pertanian Universitas Syiah Kuala, Penulis langsung melanjutkan Pendidikan Magisternya pada Ekonomi Manajemen Perguruan Tinggi Negeri yang sama serta berhasil menamatkan program Magisternya pada Tahun 2011. Penulis merupakan Dosen Tetap Yayasan sejak Tahun 2018 pada Perguruan Tinggi Vokasi Swasta Politeknik Kutaraja dengan penugasan di Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik dan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Sarana Ilmu Kutaraja. Hasil karya penulis sebelum diterbitkan nya Buku ini adalah Buku Asterisma Nanggroe (Pikiran dan Gagasan Intelektual Muda Islam Aceh) pada Tahun 2022. Penulis dapat dihubungi melalui email: desypuspita@poltekkutaraja.ac.id
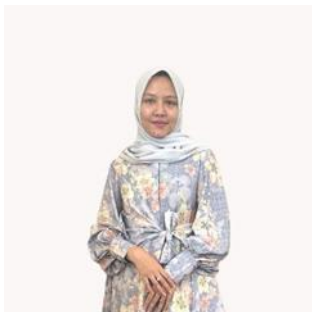
Zahriatul Aini menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi di Universitas Syiah Kuala pada tahun 2011, dan menyelesaikan Program Magister Manajemen di Universitas Syiah Kuala pada tahun 2016. Penulis saat ini berprofesi sebagai Dosen Tetap Yayasan Perguruan Tinggi Vokasi Swasta Politeknik Kutaraja pada Program Studi Administrasi Perkantoran. Penulis saat ini juga menjabat sebagai Wakil Direktur Akademik Politeknik Kutaraja dari tahun 2021 – sekarang. Beberapa hasil karya penulis yang merupakan Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu. : 1. Efforts To Empower The Turnover Rate In Order To Increase Employee Performance di tahun 2020; 2. Implementasi Teknologi Blockchain dalam Manajemen Dokumen Akademik di lingkungan Politeknik Kutaraja Banda Aceh di tahun 2024. Penulis dapat dihubungi melalui email: zahriatulaini @poltekkutaraja.ac.id

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202455469, 27 Juni 2024

Pencipta

Nama : **Abdul Rahman, Desy Puspita dkk**

Alamat : Jl. Lobak No. 57 RT005/RW006 Kel. Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15438

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Abdul Rahman, Desy Puspita dkk**

Alamat : Jl. Lobak No. 57 RT005/RW006 Kel. Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15438

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI BLUE ECONOMY Kajian Empirik Dari Perspektif Manajemen Dan Kebijakan Publik Di Bumi Serambi Mekkah**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 20 Juni 2024, di Tangerang Selatan

Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000630831

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAHI
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Abdul Rahman	Jl. Lobak No. 57 RT005/RW006 Kel. Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan
2	Desy Puspita	Jln. S. Malikul Saleh, Lrg. Seulanga No. 78/8a, Lhong Raya, Banda Raya, Banda Aceh
3	Zahriatul Aini	Jl. Tuan Digaca, Ateuk Deah Tanoh, Baiturrahman, Banda Aceh

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Abdul Rahman	Jl. Lobak No. 57 RT005/RW006 Kel. Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan
2	Desy Puspita	Jln. S. Malikul Saleh, Lrg. Seulanga No. 78/8a, Lhong Raya, Banda Raya, Banda Aceh
3	Zahriatul Aini	Jl. Tuan Digaca, Ateuk Deah Tanoh, Baiturrahman, Banda Aceh